

Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman

PENYUSUNAN
**INDERS PEMBANGUNAN
PEMUDA (IPP)**
KABUPATEN SLEMAN 2025



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk melakukan pendataan dan kompilasi data terkait kondisi pemuda di wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan ini mencakup lima domain utama yang menjadi penyusun IPP, yakni Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesenjangan Gender.

Berdasarkan dokumen tinjauan ulang pengukuran IPP yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Mei 2025, terdapat perubahan signifikan pada formulasi perhitungan IPP yang kini mencakup 16 indikator utama. Perubahan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih akurat, relevan, dan komprehensif mengenai kondisi pemuda Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman.

Kegiatan penyusunan IPP ini juga dimaksudkan untuk menghitung capaian nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025 berdasarkan formulasi nasional terbaru sekaligus sebagai bentuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence-based policy*) yang dalam hal ini berbasis data statistik kuantitatif dan sebagai pertanggungjawaban atas rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut, pencapaian nilai IPP yang terkait dengan tugas dan fungsi (Tusi) yang berbeda-beda antar dinas maupun institusi vertikal menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang erat, serta dukungan dari semua pihak terkait. Hal ini diperlukan agar capaian IPP dapat diselaraskan secara optimal dengan program dan kebijakan yang sedang berjalan sehingga hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi aktual pemuda Kabupaten Sleman saat ini.

Dokumen ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan pemuda yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sleman, November 2025

**Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman**



Heru Saptono, S.TP, MM
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19681130 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
1- PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.2.3 Sasaran	4
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.3.1 Ruang Lingkup Spasial	4
1.3.2 Ruang Lingkup Substansi	4
1.4 DASAR HUKUM	5
1.5 SISTEMATIKA	5
2- KONSEP PEMBANGUNAN PEMUDA	7
2.1 PEMUDA DAN KEPEMUDAAN	7
2.2 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	10
2.3 TANTANGAN PEMBANGUNAN PEMUDA	13
2.4 PROSES PEMBANGUNAN PEMUDA	15
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA	18
2.6 TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN	23
3- GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PERHITUNGAN IPP	26
3.1 GAMBARAN UMUM	26
3.1.1 Aspek Geografis Wilayah	26
3.1.2 Aspek Kependudukan	29
3.1.3 ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN KABUPATEN SLEMAN	34
3.2 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP	37
3.2.1 Tahap Persiapan	38
3.2.2 Tahap Pengumpulan Data	40
3.2.3 Acuan Teknis Formulasi IPP Peninjauan Ulang 2025 ..	41
4- CAPAIAN NILAI DOMAIN IPP KABUPATEN SLEMAN 2025	60

4.1	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	61
4.1.1	Indikator Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat	63
4.1.2	Indikator Persentase Pemuda yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat atau Lebih Tinggi	64
4.1.3	Indikator Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK	65
4.1.4	Capaian Nilai Domain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 2025	66
4.2	DOMAIN KESEHATAN	68
4.2.1	Indikator Angka Kesakitan Pemuda.....	70
4.2.2	Indikator Persentase Pemuda yang Merokok.....	71
4.2.3	Indikator Persentase Pemuda yang Berolahraga.....	73
4.2.4	Indikator Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	75
4.2.5	Capaian Nilai Domain Kesehatan Kabupaten Sleman 2025	77
4.3	DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK	79
4.3.1	Indikator Persentase Pemuda NEET.....	81
4.3.2	Indikator Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh...	82
4.3.3	Indikator Rasio Kewirausahaan Pemuda.....	84
4.3.4	Capaian Nilai Domain Ketenagakerjaan Layak Kabupaten Sleman 2025	85
4.4	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	87
4.4.1	Indikator Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas	88
4.4.2	Indikator Persentase Pemuda Aktif Mengikuti Organisasi	89
4.4.3	Indikator Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	91
4.4.4	Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sleman 2025	92
4.5	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	94
4.5.1	Indikator Rasio TPAK Pemuda Perempuan Terhadap Laki-Laki	95
4.5.2	Indikator Persentase Pemuda Penyandang Disabilitas yang Bekerja	97
4.5.3	Indikator Persentase Perkawinan Anak.....	98
4.5.4	Capaian Nilai Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	99

**5- ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMUDA BERDASARKAN
CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN SLEMAN 2025 .**

..... 101

5.1 CAPAIAN NILAI INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN
SLEMAN 2025 103

5.2 KUADRAN PRIORITAS CAPAIAN INDIKATOR IPP 2025 106

5.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN HASIL IPP 2025 110

6- PENUTUP 114

DAFTAR PUSTAKA 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang	2
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman	28
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman 2024	30
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024	32
Tabel 3.4 Kebutuhan Data Penyusun IPP Kabupaten Sleman 2025	41
Tabel 3.5 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP	43
Tabel 3.6 Persebaran Jumlah Responden	47
Tabel 3.7 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Usia	49
Tabel 3.8 Distribusi Usia Responden	52
Tabel 4.1 Pengukuran Domain Pendidikan dan Pelatihan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman	62
Tabel 4.2 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat Kabupaten Sleman	63
Tabel 4.3 Capaian dan Transformasi Indikator Pemuda yang Memiliki Ijazah SMA / Sederajat atau Lebih Tinggi Sleman	65
Tabel 4.4 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK Pemuda Sleman	66
Tabel 4.5 Bobot dan Nilai Transformasi Indikator Domain Pendidikan dan Pelatihan	67
Tabel 4.6 Pengukuran Domain Kesehatan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman	68
Tabel 4.7 Capaian dan Transformasi Indikator Angka Kesakitan Pemuda Sleman	71
Tabel 4.8 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Merokok Sleman	72
Tabel 4.9 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Berolahraga Sleman	73
Tabel 4.10 Jumlah Persalinan Remaja Tahun 2024	75
Tabel 4.11 Jumlah Persalinan Remaja Tahun 2025	75

Tabel 4.12	Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Kesehatan	78
Tabel 4.13	Pengukuran Domain Ketenagakerjaan Layak serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman	80
Tabel 4.14	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda NEET Sleman	81
Tabel 4.15	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh Sleman	83
Tabel 4.16	Capaian dan Transformasi Indikator Rasio Kewirausahaan Pemuda Sleman	84
Tabel 4.17	Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Ketenagakerjaan Layak	86
Tabel 4.18	Pengukuran Domain Partisipasi dan Kepemimpinan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman	87
Tabel 4.19	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas Sleman	89
Tabel 4.20	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Aktif Mengikuti Organisasi Sleman	90
Tabel 4.21	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial Sleman	91
Tabel 4.22	Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	92
Tabel 4.23	Pengukuran Domain Iklusivitas dan Ksetaraan Gender serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman ...	94
Tabel 4.24	Capaian dan Transformasi Indikator Rasio TPAK Pemuda Perempuan Terhadap Laki-Laki Sleman	96
Tabel 4.25	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Penyandang Disabilitas yang Bekerja Sleman	97
Tabel 4.26	Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Perkawinan Anak Sleman	99
Tabel 4.27	Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Inklusivitas dan Ksetaraan Gender	99
Tabel 5.1	Nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025	104
Tabel 5.2	Analisis Indikator Kuadran I	107
Tabel 5.3	Analisis Indikator Kuadran II	108
Tabel 5.4	Analisis Indikator Kuadran III	109
Tabel 5.5	Analisis Indikator Kuadran IV	110

DISPORA SLEMAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Alur Tujuan Pembangunan Pemuda dalam Menangani Beragam Situasi Pemuda	13
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Konseptual dan Pemetaan Persoalan Pembangunan Pemuda	14
Gambar 2.3 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017 – Mei 2025	19
Gambar 2.4 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Hasil Peninjauan Ulang 2025	21
Gambar 2.5 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan	24
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman	28
Gambar 3.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman	29
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman 2024	31
Gambar 3.4 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Sleman 2024	33
Gambar 3.6 Persebaran Jumlah Responden	48
Gambar 3.6 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Usia ...	50
Gambar 5.1 Kuadran Capaian Indikator IPP Kabupaten Sleman 2025	107



1- PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara nasional, upaya untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan diwujudkan melalui penetapan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai instrumen utama. IPP disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian pembangunan pemuda di berbagai dimensi strategis. Pada tahun 2022, nilai IPP nasional tercatat sebesar 55,33 (Al Izzati et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 53,33 (Bappenas, 2021). Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang terkait dengan kualitas hidup dan peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional.

Di tingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan capaian yang sangat baik dalam pembangunan kepemudaan. Pada tahun 2022, provinsi ini berhasil mencatat nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 67,5, dengan domain pendidikan sebagai penyumbang utama terhadap capaian tersebut. Kemajuan ini terus berlanjut. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IPP Yogyakarta yang mencapai 73,33 pada tahun 2023, sebagaimana

tercantum dalam publikasi resmi Indeks Pembangunan Pemuda Nasional. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup dan kapasitas pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengukuran, pada bulan Mei 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Kepemudaan telah menerbitkan Dokumen Tinjauan Ulang atas Pengukuran IPP. Dalam dokumen tersebut, terjadi perubahan signifikan pada formulasi penghitungan IPP yang kini mencakup 16 indikator utama. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat, relevan, dan komprehensif mengenai kondisi pemuda Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan (Rifano, 2017).

Tabel 1.1 Definisi Operasional Domain dan Indikator IPP Hasil Peninjauan Ulang

Domain	Indikator	Definisi
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan / kursus / training dan memperoleh sertifikat
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Persentase pemuda berusia 19-30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/ sederajat (termasuk pendidikan tinggi)
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap proporsi populasi pemuda
	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda usia 16-30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir
	Persentase pemuda yang berolahraga	Persentase pemuda yang melakukan olah raga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan usia 15-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah/ pernah kawin
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda

Domain	Indikator	Definisi
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja
	Rasio kewirausahaan pemuda	Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja
Inklusivitas dan Kesenjangan Gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas
	Persentase perkawinan anak	Proporsi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun

Sumber: Laporan IPP Peninjauan Ulang, Kemenpora

Sejalan dengan upaya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, Kabupaten Sleman turut menginisiasi proses identifikasi, analisis, dan pengukuran terhadap kemajuan pembangunan kepemudaan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Formulasi IPP ini mengacu pada tiga domain utama pembangunan kepemudaan, yaitu pengembangan individu, peningkatan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan penanganan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai sektor kehidupan.

Mengacu pada pembaruan formulasi IPP tahun 2025 yang telah ditetapkan secara nasional, penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman tahun 2025 akan menggunakan formulasi baru tersebut sebagai acuan utama. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan relevan mengenai kondisi dan perkembangan pemuda di Kabupaten Sleman serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program kepemudaan yang lebih terarah dan responsif.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari diselenggarakannya kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman tahun 2025 ini adalah untuk melakukan pendataan dan kompilasi data pada lima domain utama penyusun IPP. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menghitung capaian nilai IPP Kabupaten Sleman tahun 2025 berdasarkan formulasi terbaru yang telah ditetapkan secara nasional.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Menyusun Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman yang terdiri atas 16 indikator pembangunan kepemudaan yang tercakup dalam lima domain formulasi tahun 2025, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan Layak
4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya data-data pada lima domain utama Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman serta terhitungnya nilai capaian IPP Kabupaten Sleman tahun 2025.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial, ruang lingkup wilayah penyusunan Dokumen Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sleman.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dari Pekerjaan penyusunan IPP Kabupaten Sleman antara lain:

1. Melakukan inventarisasi pada data (primer dan sekunder) pendukung kajian penyusunan IPP

2. Melakukan kompilasi data 5 domain dan 16 indikator Indeks pembangunan pemuda.
3. Melakukan perhitungan nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025

1.4 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2025 mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Kepemudaan

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan pada dokumen Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 ini adalah:

I - PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup pengantar laporan yang menjelaskan latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud dan tujuan penyusunan pekerjaan, cakupan kegiatan, serta susunan pelaporan.

II - KONSEP PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, serta gambaran deskripsi indikator penyusun pembangunan pemuda.

III - GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PERHITUNGAN IPP

Bagian ini berisi mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Sleman yang ditinjau berdasarkan aspek geografis, demografi, dan ekonomi. Bagian juga ini menjabarkan metodologi yang digunakan dalam perhitungan capaian nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025

IV - INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN SLEMAN 2025

Bagian ini berisi hasil pengukuran indikator dan domain pengungkit IPP Kabupaten Sleman 2025 beserta pembahasannya.

V - ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMUDA BERDASARKAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN SLEMAN 2025

Bagian ini menjabarkan mengenai hasil capaian nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025 berserta implikasi pada masing-masing indikator dan rekomendasi kebijakan pengembangan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sleman didasarkan pada hasil capaian masing masing domain IPP.

VI - PENUTUP

Bab ini menyajikan rumusan kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan.



2- KONSEP PEMBANGUNAN PEMUDA

2.1 PEMUDA DAN KEPEMUDAAN

Pemuda secara umum dipahami sebagai kelompok usia yang berada dalam fase transisional antara masa kanak-kanak menuju kedewasaan, suatu periode yang sarat dengan dinamika perkembangan biologis, psikologis, kognitif, dan sosial (Usnan, 2021). Pada fase ini, individu mengalami perubahan-perubahan signifikan yang memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, serta memposisikan diri dalam struktur sosial (Erikson, 1968). Masa pemuda juga digambarkan sebagai tahap kritis dalam siklus perkembangan manusia di mana proses pencarian dan pembentukan identitas diri (*identity formation*) menjadi isu sentral (Muryadi, 2019). Pada tahap ini, pemuda berupaya menciptakan pemahaman diri yang stabil dan kohesif yang kemudian akan menentukan arah kehidupan dan pilihan-pilihan penting di masa depan.

Dalam perspektif sosiologis, pemuda tidak semata-mata dipahami berdasarkan kategori umur kronologis, namun juga dilihat sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan posisi

mereka dalam struktur masyarakat. (Ghasarian dkk., 1995) menegaskan bahwa pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki potensi transformasi yang besar karena karakteristik khas mereka, termasuk di antaranya fleksibilitas berpikir, keberanian mengambil risiko, serta kecenderungan untuk mempertanyakan nilai dan norma yang sudah mapan. Oleh sebab itu, pemuda menjadi objek sekaligus subjek penting dalam berbagai kajian yang berhubungan dengan dinamika perubahan sosial dan pembangunan masyarakat modern.

Konsep kepemudaan dalam kerangka kebijakan publik mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan pemuda, mulai dari kebutuhan dasar, tantangan yang mereka hadapi, potensi yang dimiliki, hingga peran strategis yang dapat mereka kontribusikan bagi masyarakat. Kepemudaan juga merupakan konsep multidimensi yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial-politik, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan dari berbagai bentuk risiko sosial (UNESCO, 2021). Dengan demikian, kebijakan kepemudaan tidak hanya menyoroti upaya pengembangan individu secara personal, melainkan juga menekankan pada penciptaan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang kondusif sehingga pemuda dapat tumbuh optimal dan berperan secara produktif.

Pemuda seringkali dianggap sebagai sumber energi sosial yang besar dengan tingkat kreativitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam kerangka teori gerakan sosial, Touraine menekankan bahwa pemuda memainkan peran sebagai motor penggerak perubahan (*agents of change*) karena karakteristik mereka yang lebih progresif, kritis terhadap ketidakadilan, serta terbuka terhadap ide-ide baru (TOURAINE, 1985). Keberanian mereka dalam menantang *status quo* menjadi fondasi penting bagi terciptanya inovasi sosial, reformasi struktural, dan arah pembangunan yang lebih responsif. Oleh karena itu, keberadaan ruang-ruang partisipasi yang inklusif dan mudah diakses bagi pemuda menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas kontribusi mereka dalam proses transformasi sosial.

Dari perspektif pembangunan, pemuda diposisikan sebagai aktor strategis dalam mempercepat kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu wilayah. *Human Development Theory* yang dipopulerkan oleh (Clapp & Sen, 1999) menekankan pentingnya pembangunan

berbasis kapabilitas (*capability approach*), yaitu pembangunan yang berfokus pada perluasan kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai. Dalam konteks ini, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama peningkatan daya saing daerah maupun nasional melalui akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja yang layak, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Ketika berbagai elemen tersebut terpenuhi, pemuda mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, inovasi ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Kepemudaan juga erat kaitannya dengan proses pembentukan kepemimpinan, kewargaan aktif, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Checkoway (2011) menyatakan bahwa partisipasi pemuda merupakan hak sekaligus mekanisme penting untuk membangun kapasitas kewargaan (*civic capacity*), termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan, berpikir kritis, berkolaborasi, serta memahami isu-isu sosial dan politik. Keterlibatan pemuda dalam organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, forum konsultatif, proses perencanaan pembangunan, hingga struktur pemerintahan menjadi indikator penting bagi terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Semakin besar keterlibatan pemuda, semakin kuat fondasi demokrasi dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Berdasarkan berbagai perspektif teoretis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemuda dan isu kepemudaan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memberikan ruang berarti bagi pemuda berisiko menghasilkan kebijakan yang bersifat elitis, tidak adaptif, dan gagal menjawab kebutuhan generasi masa depan. United Nations (2015) menekankan urgensi pendekatan pembangunan yang holistik, inklusif, serta menempatkan pemuda sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan itu, pemuda tidak lagi diposisikan sebagai kelompok rentan atau penerima manfaat belaka, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas untuk memperkuat fondasi sosial, ekonomi, politik, serta budaya masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat

ditentukan oleh sejauh mana potensi pemuda dihargai, dikelola, dan diberdayakan secara optimal dan berkelanjutan.

2.2 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pemuda merupakan kelompok usia yang memegang posisi strategis dalam dinamika pembangunan sosial, ekonomi, maupun politik suatu bangsa. Meskipun demikian, batasan usia pemuda tidak bersifat universal karena setiap negara menetapkan definisinya sesuai dengan latar sosial, budaya, serta arah kebijakan nasional yang dianut. Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pemuda sebagai individu berusia 15 hingga 24 tahun. Definisi ini terutama dimanfaatkan dalam berbagai program internasional yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan inisiatif global lainnya. PBB memandang kelompok usia ini sebagai fase kritis transisi menuju kedewasaan, ditandai oleh perubahan fisiologis, emosional, serta sosial yang sangat dinamis. Karena itu, pemuda diposisikan sebagai aktor potensial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, inovasi, serta pemeliharaan perdamaian dunia (Naviah, 2020).

Di Indonesia, definisi pemuda dirumuskan secara lebih luas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menetapkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16 hingga 30 tahun yang sedang berada pada fase penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia yang lebih panjang tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap keragaman pengalaman perkembangan individu mulai dari masa pendidikan, proses memasuki pasar kerja, pembentukan keluarga, hingga keterlibatan dalam arena sosial-politik. Pemerintah menempatkan pemuda sebagai sumber daya strategis yang harus dibina, dilibatkan, serta diberdayakan dalam berbagai sektor pembangunan guna menjawab tantangan masa depan.

Data BPS dalam Statistik Pemuda Indonesia 2023 menunjukkan bahwa jumlah pemuda Indonesia mencapai lebih dari 64,16 juta jiwa atau sekitar 23,18% dari keseluruhan populasi. Walaupun jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, proporsinya terhadap populasi nasional justru menurun, mengindikasikan pergeseran struktur demografis menuju kelompok usia dewasa. Fenomena ini menjadi bagian dari transisi demografi yang dalam

beberapa dekade mendatang akan membawa Indonesia memasuki fase penuaan penduduk (*aging population*). Meski demikian, Indonesia saat ini masih berada dalam periode bonus demografi, yaitu periode di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok nonproduktif. Bonus demografi yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 diproyeksikan berlangsung hingga 2041. Proyeksi tersebut bervariasi di masing-masing provinsi.

Di tengah peluang yang masih tersedia ini, karakteristik pemuda Indonesia menunjukkan keragaman yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Distribusi geografis pemuda memperlihatkan bahwa sekitar 59,91% tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini menggambarkan pola migrasi untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Secara gender, jumlah pemuda laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Dari sisi usia, kelompok 25-30 tahun mendominasi komposisi pemuda dan berada pada fase produktif. Sementara itu, tingkat pendidikan pemuda menunjukkan perbaikan dengan mayoritas telah menyelesaikan pendidikan menengah atas dan sekitar satu dari sepuluh pemuda sudah menamatkan pendidikan tinggi. Dalam aspek ketenagakerjaan, sekitar 63,68% pemuda merupakan angkatan kerja; sebagian besar bekerja di sektor formal. Namun, persoalan besar masih muncul berupa hampir setengah pemuda bekerja dengan upah yang tidak layak dan sekitar 8,54% masih menganggur. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat bonus demografi belum sepenuhnya teroptimalkan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemuda ditempatkan sebagai pilar utama yang menentukan keberhasilan visi jangka panjang Indonesia. Ia juga termasuk agenda besar Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan pemuda mencakup tiga bentuk pelayanan utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Ketiganya bertujuan membentuk pemuda yang memiliki kesadaran penuh atas perannya dalam masyarakat, memperoleh kesempatan untuk aktif berpartisipasi di berbagai sektor, serta berkembang sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan bangsa.

Selain itu, UU tersebut juga memuat enam bidang utama pembangunan pemuda, yakni pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, kemitraan, organisasi kepemudaan,

serta pemberian penghargaan kepada pemuda. Enam aspek ini menekankan betapa luas dan komprehensifnya cakupan pembangunan pemuda, sekaligus menunjukkan posisi penting pemuda dalam struktur sosial dan politik Indonesia.

Dalam kerangka RPJPN 2025-2045, pembangunan pemuda diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia generasi mendatang yang unggul. Fokus utamanya adalah menciptakan pemuda yang terdidik, memiliki kecakapan psikologis yang matang, meliputi perkembangan emosi, bahasa, sosial, moral, kepribadian, hingga spiritualitas, serta berdaya secara ekonomi. Pemuda yang sehat secara fisik dan mental diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Upaya ini terkait erat dengan pilar pertama pembangunan Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi pada pilar lainnya seperti pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan ketahanan nasional.

Untuk mengoptimalkan peran pemuda dan mengatasi akar persoalan yang selama ini menghambat pengembangan potensi mereka, pembangunan pemuda harus diarahkan pada penyediaan layanan kepemudaan yang komprehensif, mencakup:

1. **Layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal** yang mampu menanamkan nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan modern.
2. **Layanan kesehatan fisik dan mental** yang mudah diakses serta responsif terhadap tantangan kesehatan kontemporer.
3. **Fasilitasi ketenagakerjaan** yang memberi ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam ekonomi produktif serta berkontribusi nyata di berbagai sektor pembangunan.
4. **Pengelolaan kebijakan pemuda yang sinergis**, melibatkan kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan.



Sumber: Studi Pendahuluan RPJPN 2025 - 2045 yang dilakukan oleh Bappenas

Gambar 2.1 Bagan Alur Tujuan Pembangunan Pemuda dalam Menangani Beragam Situasi Pemuda

Agar seluruh upaya tersebut berjalan efektif, pembangunan pemuda harus berlandaskan prinsip: inklusif dan setara, ramah pemuda, partisipatif, adaptif, sinergis, serta efektif-efisien dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap keragaman identitas dan kebutuhan pemuda, peka terhadap dinamika global seperti digitalisasi dan perubahan iklim, serta terkoordinasi lintas aktor.

Dengan memadukan dinamika demografis, definisi pemuda, karakteristik sosial-ekonomi, serta arah kebijakan pembangunan, terlihat bahwa pemuda merupakan aset strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Mengingat Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi, investasi pada pembangunan pemuda menjadi semakin mendesak. Pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang diperlukan agar pemuda mampu mengemban peran sebagai motor penggerak pembangunan nasional sekaligus kunci utama keberhasilan Indonesia Emas 2045.

2.3 TANTANGAN PEMBANGUNAN PEMUDA

Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 pada sektor kepemudaan menunjukkan bahwa kondisi aktual pemuda Indonesia masih jauh dari gambaran ideal yang diharapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Secara umum, kapasitas individu pemuda, baik dari aspek pendidikan, kompetensi, maupun kesiapan mental, dinilai belum mencapai tingkat yang memadai untuk menghadapi tantangan transformasi sosial-ekonomi nasional. Di samping itu, kualitas kesehatan pemuda masih memerlukan perhatian serius mengingat tingginya paparan terhadap perilaku berisiko, seperti

meningkatnya prevalensi merokok, keterlibatan dalam tindak kriminal, serta kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Persoalan-persoalan tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi kesehatan dan terbatasnya akses pemuda terhadap layanan pendukung kesehatan fisik maupun mental.

Dalam ranah partisipasi sosial dan ekonomi, posisi pemuda juga belum menunjukkan performa optimal. Tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda serta masih terbatasnya keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, termasuk dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan, menandakan bahwa potensi kontribusi pemuda terhadap pembangunan belum sepenuhnya termobilisasi. Fenomena ini mencerminkan adanya hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi pemuda untuk berperan aktif sebagai bagian dari modal sosial masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat apabila permasalahan pemuda dipandang semata-mata sebagai kekurangan individu; sebaliknya, tantangan yang dihadapi pemuda merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal (kapasitas personal) dan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan sosial, ekonomi, kebijakan, serta akses terhadap layanan publik.



Studi Pendahuluan RPJPN 2025 - 2045 yang dilakukan oleh Bappenas
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Konseptual dan Pemetaan Persoalan Pembangunan Pemuda

Lebih jauh lagi, pembangunan pemuda tidak dapat dipahami sebagai agenda yang berdiri sendiri atau terpisah dari pembangunan nasional yang lebih luas. Upaya peningkatan partisipasi tenaga kerja pemuda dan penguatan peran mereka dalam

pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan makro yang mungkin tidak secara eksplisit ditujukan kepada kelompok pemuda, tetapi memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Hal ini mencakup, misalnya, kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat membuka ruang kerja dan peluang usaha baru bagi pemuda; pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jaringan transportasi, dan konektivitas digital yang memperbaiki iklim investasi; serta reformasi regulasi yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan perluasan ruang partisipasi dalam pembangunan.

Dengan demikian, agenda pembangunan pemuda memerlukan pendekatan sistemik dan bersifat lintas sektor. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di pundak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai institusi yang membidangi urusan kepemudaan, melainkan harus diinternalisasi oleh seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap kebijakan publik, baik yang berkaitan dengan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, teknologi, infrastruktur, maupun tata pemerintahan, pada hakikatnya harus berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemuda sebagai kelompok strategis yang akan menentukan daya saing bangsa di masa mendatang. Dengan pemahaman tersebut, pembangunan pemuda dapat menjadi bagian integral dari seluruh program pembangunan nasional sehingga mampu memberikan dampak transformatif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2.4 PROSES PEMBANGUNAN PEMUDA

Pembangunan pemuda tidak dapat dipandang sebagai proses teknokratis yang sekadar mengikuti alur perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai sebuah ekosistem kolaboratif yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat sipil, sektor bisnis, hingga para pemuda itu sendiri. Dengan kata lain, efektivitas pembangunan pemuda sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor untuk bekerja secara sinergis dan berbagi tanggung jawab dalam menciptakan kondisi

yang memungkinkan pemuda berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu landasan krusial dalam membangun kolaborasi tersebut adalah komitmen bersama. Komitmen ini tidak dapat bersifat abstrak, melainkan harus dibangun atas dasar pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai lanskap permasalahan dan peluang pembangunan pemuda di suatu wilayah. Pada titik inilah **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** memainkan peranan strategis. IPP menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif pemuda pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, hingga kepemimpinan, yang dapat dijadikan basis dialog, koordinasi, dan konsensus dalam penentuan arah kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pemuda tidak hanya tercermin dari meningkatnya nilai IPP, tetapi juga melalui sejauh mana IPP mampu menjadi medium yang menyatukan perspektif antarpemangku kepentingan dalam menyusun agenda bersama.

Komitmen yang dibangun melalui pemahaman atas IPP tersebut akan menghasilkan keselarasan dalam seluruh tahapan pembangunan pemuda. Proses ini mencakup siklus perencanaan yang matang, implementasi kebijakan yang tepat sasaran, hingga pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Sebagai proses kumulatif yang terus berkembang, setiap siklus pembangunan akan menghasilkan pembelajaran baru yang memperkuat siklus berikutnya. Dengan cara ini, pembangunan pemuda dapat diwujudkan secara berlapis, komprehensif, dan responsif terhadap perubahan.

Pada dasarnya, proses pembangunan pemuda yang ideal harus mengikuti sebuah siklus yang sepenuhnya berbasis data. Dalam hal ini, IPP berperan sebagai instrumen kunci untuk mengidentifikasi kondisi awal, mengukur capaian, dan memetakan kebutuhan intervensi lanjutan. Angka IPP tidak hanya berfungsi sebagai indikator evaluatif tetapi juga sebagai perangkat analitis untuk memahami secara lebih mendalam hubungan kausal antara kondisi pemuda saat ini dengan intervensi kebijakan yang telah atau belum dilakukan.

Tahap pertama dalam siklus ini adalah **analisis akar masalah**. Analisis ini menggunakan data IPP untuk mengidentifikasi isu-isu substantif yang menghambat pembangunan pemuda, baik di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, ketika sebuah daerah

menunjukkan skor rendah pada dimensi kesehatan atau pendidikan, maka hal tersebut menjadi sinyal awal adanya persoalan struktural yang membutuhkan perhatian khusus. Melalui analisis yang lebih rinci, penelusuran data kuantitatif, wawancara, serta studi lapangan, pemangku kepentingan dapat memahami konteks dan penyebab yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Dengan demikian, IPP memberikan kerangka logis yang kuat untuk membaca tantangan pembangunan secara lebih tajam dan berbasis bukti.

Langkah selanjutnya adalah **perumusan kebijakan dan perencanaan program**. Kebijakan yang disusun harus merespon permasalahan yang teridentifikasi sebelumnya dan didukung oleh dokumen perencanaan yang kuat, alokasi anggaran yang realistis, target yang terukur, serta indikator keberhasilan yang jelas. Kebijakan yang efektif bukan hanya menjawab persoalan, tetapi juga mampu mendorong transformasi kondisi pemuda secara lebih luas dan sistematis. Dalam konteks ini, perencanaan yang presisi sangat menentukan arah keberhasilan implementasi di lapangan.

Tahap ketiga adalah **pemantauan dan evaluasi**. Tahapan ini harus dilakukan secara konsisten dan sistematis sejak program mulai dijalankan hingga selesai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah implementatif berjalan sesuai rencana sekaligus menilai dampak kebijakan terhadap kelompok pemuda yang menjadi sasaran. Evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik di tengah pelaksanaan maupun setelah program berakhir, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan koreksi cepat, perbaikan strategi, serta optimalisasi kebijakan agar semakin efektif dalam jangka panjang.

Temuan dari proses pemantauan dan evaluasi kemudian menjadi masukan penting bagi penyempurnaan kebijakan pada siklus berikutnya. Dengan demikian, kebijakan pembangunan pemuda akan terus berkembang, semakin adaptif, dan semakin akurat dalam menjawab dinamika tantangan pemuda dari waktu ke waktu. Seperti tergambar dalam Gambar 6, siklus ini bersifat terus-menerus: setiap hasil evaluasi akan kembali tercermin dalam angka IPP, yang kemudian menjadi dasar analisis dan kebijakan berikutnya. Dengan demikian, pembangunan pemuda berbasis IPP tidak hanya bersifat berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan selalu relevan, kontekstual, dan sensitif terhadap perubahan kebutuhan pemuda di setiap wilayah.

Pada akhirnya, siklus pembangunan pemuda yang terpadu dan berbasis data ini diharapkan mampu memberikan dampak terbaik bagi peningkatan kualitas hidup pemuda Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga menjadi fondasi penting dalam mempercepat terwujudnya **Indonesia Emas 2045**, di mana pemuda ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan bangsa, bukan semata sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek dan aktor strategis yang menentukan arah masa depan Indonesia.

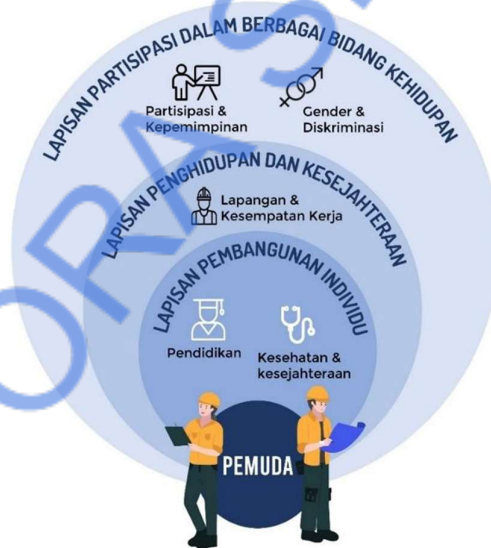
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA

Pemerintah Indonesia mulai menginisiasi penyusunan **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** pada tahun 2015. Inisiasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan kepemudaan yang lebih komprehensif. Sebelum hadirnya instrumen ini, pengukuran pembangunan pemuda dilakukan secara terfragmentasi dan sektoral. Biasanya, pengukuran hanya berdasarkan capaian program di masing-masing kementerian atau lembaga. Tidak adanya sistem data yang terintegrasi menyebabkan pemerintah kesulitan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pemuda Indonesia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun tingkat partisipasi sosial. Dengan terbitnya **Laporan IPP 2017** pada tahun 2018, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki alat ukur yang secara sistematis dapat menilai dinamika kepemudaan lintas wilayah sehingga mampu menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih objektif dan responsif terhadap kebutuhan pemuda.

Dalam proses perumusannya, IPP Indonesia mengadaptasi dan mengkonfigurasi berbagai pendekatan **Youth Development Index (YDI)** yang digunakan di tingkat internasional, seperti YDI Commonwealth Secretariat (2013), ASEAN YDI, Australian YDI, serta indeks pembangunan pemuda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Adaptasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka IPP tidak hanya relevan dengan karakteristik demografis dan sosial Indonesia, tetapi juga sejalan dengan standar global terkait pembangunan pemuda. Melalui integrasi berbagai referensi tersebut, IPP kemudian dibangun dengan struktur metodologis yang mencakup penetapan domain, indikator, sumber data, hingga mekanisme perhitungan indeks secara berkala. Dengan demikian, IPP tidak sekadar menjadi alat statistik, tetapi berkembang

menjadi **instrumen kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)** yang mendukung implementasi pembangunan pemuda yang inklusif dan berkelanjutan.

Hingga Mei 2025, IPP terdiri dari **tiga lapisan utama pembangunan** yang dikembangkan menjadi **lima domain** dan **15 indikator penyusun**. Kelima domain tersebut meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan dan kesejahteraan; (3) lapangan dan kesempatan kerja; (4) partisipasi dan kepemimpinan; serta (5) gender dan diskriminasi. Seluruh indikator dalam domain-domain tersebut bersumber dari data nasional seperti **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)** dan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**, yang menghasilkan data tahunan di tingkat nasional dan provinsi. IPP juga telah diintegrasikan dalam **Rencana Strategis Kemenpora** serta menjadi salah satu indikator utama dalam **RPJMN 2020–2024**, sehingga memperkuat posisinya sebagai alat ukur pembangunan kepemudaan tingkat nasional.



Sumber: Dokumen IPP Nasional 2023

Gambar 2.3 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017 – Mei 2025

Secara struktur, IPP menggambarkan tiga lapisan pembangunan pemuda:

1. Lapisan Pembangunan Individu

Lapisan ini menekankan penguatan kapasitas dasar pemuda, meliputi pendidikan serta kesehatan fisik dan mental. Dua domain yang tercakup di dalamnya adalah:

- Domain Pendidikan, dengan indikator: rata-rata lama sekolah, APK Sekolah Menengah, dan APK Perguruan Tinggi.
- Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, mencakup indikator seperti angka kesakitan pemuda, persentase korban kejahatan, persentase pemuda merokok, serta persentase remaja perempuan hamil.

Lapisan ini diberikan porsi utama karena pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat fundamental bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri dan memperluas kapasitas pilihan hidup.

2. Lapisan Penghidupan dan Kesejahteraan

Lapisan ini mencerminkan kemampuan pemuda untuk memasuki pasar tenaga kerja dan mencapai kemandirian ekonomi. Domain yang termasuk adalah:

- Lapangan dan Kesempatan Kerja, diukur melalui persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda.

Lapisan ini menunjukkan seberapa besar kontribusi pembangunan individu diterjemahkan ke dalam penciptaan peluang ekonomi bagi pemuda, baik melalui pekerjaan layak maupun kewirausahaan mandiri.

3. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Lapisan ketiga mencerminkan kemampuan pemuda untuk terlibat secara aktif dalam dinamika sosial, politik, dan kehidupan komunitas. Lapisan ini terdiri atas dua domain:

- Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, mencakup indikator keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan.
- Domain Gender dan Diskriminasi, yang menilai keseimbangan akses pemuda perempuan dalam pendidikan, ketenagakerjaan formal, serta indikator pencegahan perkawinan usia anak.

Lapisan ini memastikan pembangunan pemuda mempromosikan prinsip inklusivitas, non-diskriminasi, serta menjamin ruang bagi seluruh pemuda, termasuk perempuan dan kelompok rentan, untuk berpartisipasi secara seimbang.

Berdasarkan **Laporan IPP 2021** dan temuan **Studi Pendahuluan RPJPN 2025–2045**, sejumlah keterbatasan konseptual dan teknis perlu dibenahi dalam IPP:

1. Dimensi inklusivitas pemuda belum terakomodasi secara memadai, terutama bagi pemuda penyandang disabilitas.
2. Sebagian indikator dianggap kurang relevan untuk mengukur arah pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
3. Secara metodologis, perhitungan IPP:
 - a. hanya dapat dilakukan sampai tingkat provinsi,
 - b. menggunakan agregasi berbasis desil,
 - c. memiliki sejumlah kendala teknis yang membatasi kemampuan indeks dalam menangkap disparitas antarwilayah secara lebih rinci.

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, pemerintah melakukan peninjauan ulang IPP secara menyeluruh pada 2023–2024. Revisi ini memastikan bahwa indikator pembangunan pemuda dapat lebih mencerminkan kebutuhan masa depan dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.



Sumber: Panduan Teknis Pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti, BAPPENAS 2025

Gambar 2.4 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Hasil Peninjauan Ulang 2025

Hasil peninjauan ulang mempertahankan struktur **tiga lapisan** namun dengan pembaruan domain dan indikator agar lebih relevan:

1. Lapisan Penguatan Individu

Lapisan ini merepresentasikan pemenuhan hak dasar pemuda untuk mengembangkan kapasitas diri. Domain yang diukur meliputi:

- Pendidikan dan Pelatihan (formal dan nonformal)
- Kesehatan Fisik, Mental, dan Reproduksi

Lapisan ini menekankan pentingnya kondisi kesehatan dan akses pendidikan sebagai fondasi kebebasan pemuda untuk mengambil keputusan dan memperluas pilihan hidup.

2. Lapisan Penghidupan dan Kesejahteraan

Lapisan ini menilai kemampuan pemuda untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui:

- Domain Ketenagakerjaan Layak, yang menilai aspek keterlibatan pemuda dalam angkatan kerja, akses terhadap pekerjaan berkualitas, serta kecenderungan pemuda menjadi wirausahawan.

3. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Lapisan ini menilai sejauh mana pemuda memperoleh ruang untuk:

- berpartisipasi dalam organisasi dan komunitas,
- terlibat dalam proses pengambilan keputusan,
- menikmati akses setara tanpa diskriminasi.

Lapisan ini diukur melalui:

- Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta
- Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender.

Lapisan ini memastikan pembangunan pemuda memperhatikan keberagaman kondisi, termasuk pemuda perempuan dan pemuda disabilitas.

Peninjauan ulang ini menjadikan IPP sebagai indikator Prioritas Nasional (PN), dengan indikator turunannya masuk sebagai indikator Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam **RPJMN 2025–2029**. Dengan struktur yang diperbarui tersebut, IPP bukan hanya alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi pemandu strategis dalam menjamin pembangunan pemuda yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan cita-cita **Indonesia Emas 2045**.

2.6 TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Secara terminologis, kepemudaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pencapaian diri, serta aspirasi pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep ini tidak hanya menyoroti keberadaan pemuda sebagai kelompok usia tertentu, tetapi juga menekankan peran dan kontribusinya dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi pengembangan seluruh dimensi kehidupan pemuda, baik secara individu maupun kolektif. Tujuan utama dari pembangunan kepemudaan adalah menciptakan generasi muda yang berdaya, berkarakter, mandiri, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional dan global.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan pelayanan kepemudaan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda. Kegiatan ini dapat mencakup pelatihan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan literasi digital dan sosial, serta penguatan semangat kebangsaan dan solidaritas sosial. Pelayanan kepemudaan berfungsi sebagai wadah strategis untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, semangat inovasi, kemandirian, dan rasa tanggung jawab sosial, sehingga pemuda mampu menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.5 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Agar hal tersebut dapat dijalankan, pemerintah daerah membentuk sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengurus urusan kepemudaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh pemuda di setiap daerah.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

- a. Pendidikan agama dan akhlak mulia
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan
- c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- d. Penumbuhan semangat bela negara
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal

- f. Pemahaman kemandirian ekonomi
- g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

- a. Peningkatan iman dan takwa
- b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional
- d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
- e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan
- c. Pengaderan
- d. Pembimbingan
- e. Pendampingan
- f. Forum kepemimpinan pemuda

4. Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pemagangan
- c. Pembimbingan
- d. Pendampingan
- e. Kemitraan
- f. Promosi



g. Bantuan akses permodalan

5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan,
- b. Pendampingan, dan/atau
- c. Forum kepemimpinan pemuda

3- GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PERHITUNGAN IPP

3.1 GAMBARAN UMUM

3.1.1 Aspek Geografis Wilayah

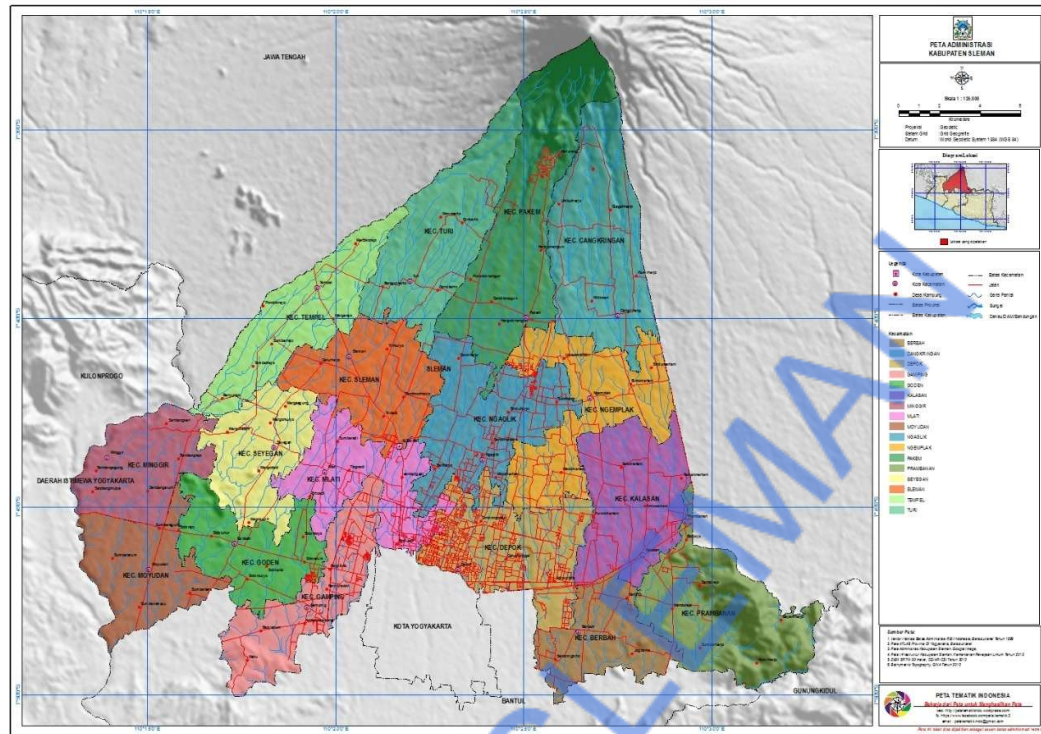
Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara geografis terletak antara 110°13'00" hingga 110°33'00"

Bujur Timur dan 7°34'51" hingga 7°47'30" Lintang Selatan. Batas koordinat tersebut mencakup area seluas sekitar 574,82 km², yang menjadikan Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten dengan posisi strategis di kawasan selatan Pulau Jawa. Wilayah ini secara administratif terdiri atas 17 Kepanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Padukuhan, serta termasuk dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh¹.

Berikut batas wilayah Kabupaten Sleman dengan kabupaten/kota sekitarnya:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul

¹ Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman

Berikut rincian luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sleman.

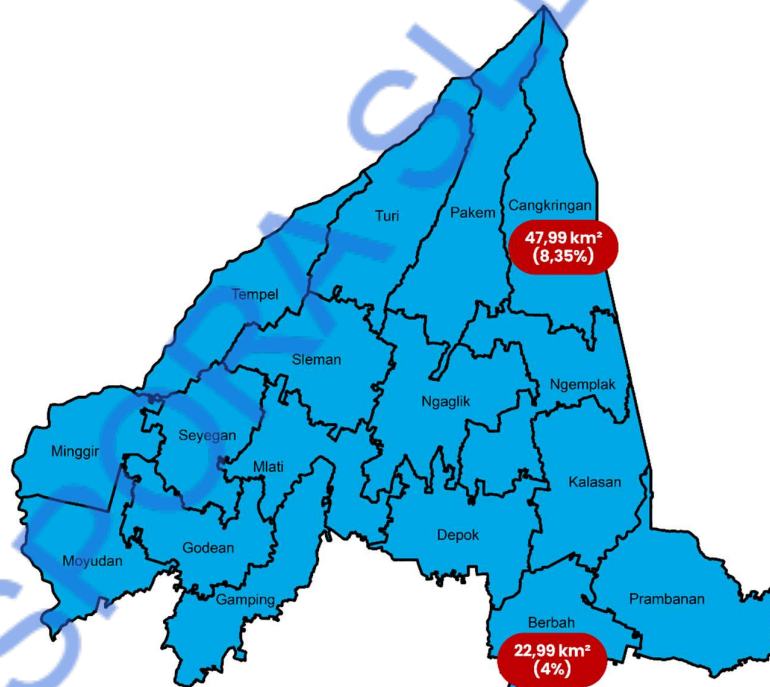
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas
1	Moyudan	27,62	4,80%
2	Minggir	27,27	4,74%
3	Seyegen	26,63	4,63%
4	Godean	26,84	4,67%
5	Gamping	29,25	5,09%
6	Mlati	28,52	4,96%
7	Depok	35,55	6,18%
8	Berbah	22,99	4,00%
9	Prambanan	41,35	7,19%
10	Kalasan	35,84	6,23%
11	Ngemplak	35,71	6,21%
12	Ngaglik	38,52	6,70%
13	Sleman	31,32	5,45%
14	Tempel	32,49	5,65%
15	Turi	43,09	7,50%
16	Pakem	43,84	7,63%
17	Cangkringan	47,99	8,35%
TOTAL		574,82	100%

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Dengan total luas wilayah mencapai 574,82 km², Kabupaten Sleman mencakup sekitar 18% dari keseluruhan luas

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikannya salah satu wilayah dengan kontribusi spasial yang signifikan dalam struktur administratif provinsi. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Kecamatan Cangkringan merupakan kecamatan terluas dengan cakupan area mencapai 47,99 km², yang memberikan ruang bagi perkembangan permukiman, kawasan lindung, hingga aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Sebaliknya, Kecamatan Berbah menjadi kecamatan dengan luasan terkecil, yakni hanya 22,99 km². Variasi luasan antar kecamatan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kapasitas ruang fisik, tetapi juga memengaruhi pola pembangunan, distribusi sarana-prasarana, dinamika kependudukan, serta strategi perencanaan wilayah di Kabupaten Sleman secara keseluruhan.



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Gambar 3.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman

3.1.2 Aspek Kependudukan

Penduduk merupakan aset pembangunan yang memiliki peran sangat strategis. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan penduduk tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan keberlanjutan serta efektivitas

proses pembangunan itu sendiri. Dari sudut pandang pengembangan wilayah, masyarakat berperan sebagai subjek yang aktif. Mereka terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian berbagai sumber daya dengan cara yang bijaksana dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam pembangunan, posisi penduduk memiliki dua dimensi yang saling berkaitan: sebagai modal sekaligus potensi tantangan. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan penggerak pembangunan apabila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, seperti tingkat pendidikan yang memadai, keterampilan yang relevan, dan kondisi kesehatan yang optimal. Populasi yang berkualitas mampu memperkuat kapasitas produktif daerah serta mendukung transformasi sosial-ekonomi secara signifikan.

Namun, di sisi lain, apabila kualitas sumber daya manusianya masih rendah, jumlah penduduk yang besar justru dapat memunculkan berbagai persoalan. Keterbatasan kompetensi, rendahnya akses terhadap layanan dasar, dan kondisi kesehatan yang kurang baik dapat menciptakan beban sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Dalam situasi tersebut, penduduk bukan lagi menjadi motor pembangunan, melainkan tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman Tahun 2025, jumlah penduduk kabupaten pada tahun 2024 mencapai 1.125.571 jiwa. Data kependudukan ini merupakan fondasi kritis untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berperspektif demografi, termasuk dalam merencanakan program untuk kepemudaan, ketenagakerjaan, pendidikan, serta layanan sosial.

Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Sleman.

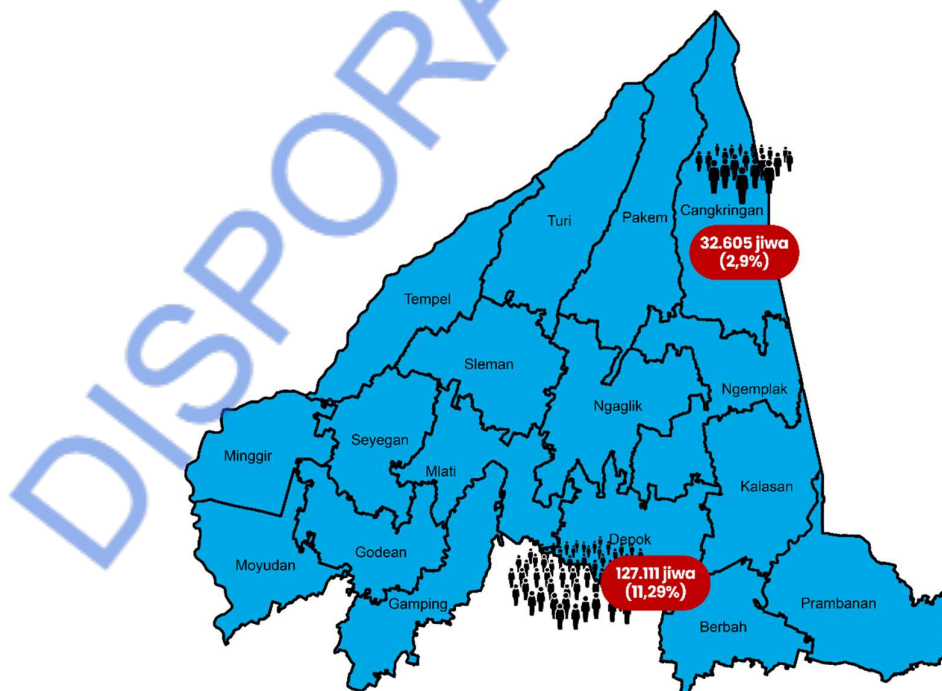
Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Moyudan	33.981	12.303
2	Minggir	32.747	12.008
3	Seyegen	53.203	19.979
4	Godean	72.604	27.051
5	Gamping	97.408	33.302
6	Mlati	96.088	33.691

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km ²
7	Depok	127.111	35.756
8	Berbah	58.265	25.344
9	Prambanan	55.740	13.480
10	Kalasan	87.864	24.516
11	Ngemplak	66.774	18.699
12	Ngaglik	104.340	27.087
13	Sleman	72.965	23.297
14	Tempel	55.576	17.106
15	Turi	38.732	8.989
16	Pakem	39.568	9.026
17	Cangkringan	32.605	6.794
Kabupaten Sleman		1.125.571	19.581

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Berdasarkan data tahun 2024 yang disajikan dalam publikasi *Kabupaten Sleman dalam Angka 2025* oleh Badan Pusat Statistik, Kecamatan Depok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman, yaitu mencapai **127.111 jiwa**, atau sekitar **11,29%** dari total penduduk kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Cangkringan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni **32.605 jiwa**, yang setara dengan **2,90%** dari keseluruhan populasi.



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman 2024

Analisis demografi Kabupaten Sleman dapat diperjelas melalui kajian terhadap tingkat kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman tahun 2024, terlihat adanya disparitas yang cukup signifikan antarwilayah. Kecamatan Depok tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai **35.756 jiwa per km²**. Kondisi ini menunjukkan karakter kawasan yang sangat urban, pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan permukiman, sehingga mendorong konsentrasi populasi dalam jumlah besar pada area yang relatif terbatas.

Sebaliknya, Kecamatan Cangkringan memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu **6.794 jiwa per km²**. Kepadatan yang rendah ini menggambarkan karakter wilayah yang lebih rural, dengan bentang lahan yang luas serta pemanfaatan ruang yang tidak sepadat kawasan perkotaan. Kondisi geografis dan kedekatannya dengan kawasan rawan bencana Gunung Merapi turut memengaruhi pola persebaran penduduk di wilayah tersebut.

Aspek demografi Kabupaten Sleman juga dapat dianalisis melalui komposisi usia penduduk. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk perempuan tercatat lebih tinggi, yaitu sebanyak **568.135 jiwa**, dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang mencapai **557.436 jiwa**.

Selanjutnya, distribusi penduduk Kabupaten Sleman menurut kelompok umur dan jenis kelamin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024

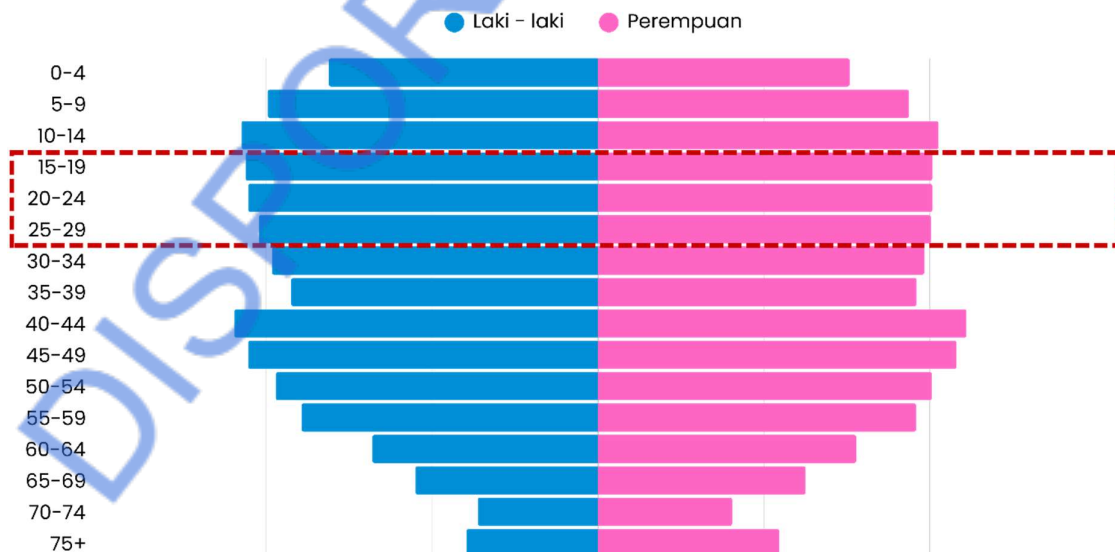
Rentang Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	32.458	30.359	62.817
5-9	39.843	37.514	77.357
10-14	43.000	41.064	84.064
15-19	42.504	40.326	82.830
20-24	42.177	40.327	82.504
25-29	40.906	40.161	81.067
30-34	39.308	39.353	78.661
35-39	37.001	38.435	75.436
40-44	43.854	44.460	88.314
45-49	42.202	43.235	85.437
50-54	38.848	40.279	79.127
55-59	35.748	38.377	74.125
60-64	27.207	31.149	58.356

Rentang Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
65-69	22.021	25.053	47.074
70-74	14.490	16.185	30.675
75+	15.869	21.858	37.727
Total	557.436	568.135	1.125.571

Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Menurut data kependudukan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, kelompok usia pemuda – yang dalam ini menggunakan pendekatan rentang usia milik BPS yaitu 15 hingga 29 tahun – mencakup bagian signifikan dari struktur demografi daerah. Jumlah pemuda di Kabupaten Sleman pada tahun terbaru tercatat sebanyak **246.401 jiwa**, dengan komposisi **125.587 jiwa penduduk laki-laki** dan **120.814 jiwa penduduk perempuan**.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia strategis yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Proporsi pemuda yang relatif besar ini menggambarkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung oleh kebijakan pembangunan kepemudaan yang tepat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial, dan kesetaraan gender.



Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2025

Gambar 3.4 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Sleman 2024

3.1.3 Isu Strategis Kepemudaan Kabupaten Sleman

Kajian awal dalam *Studi Pendahuluan RPJPN 2025-2045 Bidang Kepemudaan* menunjukkan bahwa kondisi pemuda di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Secara umum, kualitas kapabilitas individu pemuda belum berada pada tingkat yang ideal; mereka masih berhadapan dengan keterbatasan dalam mengembangkan kompetensi diri, baik pada aspek pendidikan, keterampilan, maupun kesiapan memasuki dunia kerja. Di sisi lain, tingkat kesehatan pemuda masih perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besar dari mereka masih terpapar perilaku berisiko, seperti merokok, penyalahgunaan zat adiktif, hingga kecenderungan terlibat dalam tindakan kriminal.

Aspek partisipasi pun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan, dunia ketenagakerjaan, maupun kegiatan sosial di lingkungan mereka masih rendah. Tingginya tingkat pengangguran pemuda dan minimnya partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan mencerminkan bahwa peran pemuda sebagai aktor pembangunan belum optimal.

Padahal, pemuda merupakan salah satu modal strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, berbagai permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan jangka menengah, khususnya dalam kerangka Prioritas Nasional 4 yang menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda – termasuk generasi milenial dan Gen-Z – dan penyandang disabilitas. Dalam konteks tersebut, negara masih menghadapi sejumlah tantangan penting, antara lain:

1. **Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi**, terutama pada kelompok 20% rumah tangga termiskin yang hanya mencapai 17,51%.
2. **Kualitas lulusan perguruan tinggi yang belum memadai**, terlihat dari:
 - a. Tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi sebesar 9,29%.
 - b. Masih adanya 2,83% lulusan yang bekerja pada pekerjaan berkeahlian rendah.

3. **Rendahnya proporsi penduduk berpendidikan tinggi**, yaitu baru 10,51% dari penduduk usia ≥ 15 tahun pada 2023.
4. **Masih terjadinya perkawinan usia anak**, ditunjukkan oleh 6,92% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18.
5. **Indeks Pembangunan Pemuda yang belum optimal**, termasuk tingginya persentase pemuda NEET (25,80%).
6. **Produktivitas tenaga kerja yang lemah**, salah satunya disebabkan dominasi angkatan kerja berpendidikan maksimal SMP/MTs (52,32%).
7. **Rendahnya tingkat aktivitas berolahraga**, di mana hanya 9,04% penduduk usia >10 tahun yang berolahraga minimal 3 kali/150 menit per minggu.
8. **Kultur olahraga yang belum mengakar**, karena hanya 25,92% penduduk >10 tahun yang melakukan olahraga pada minggu terakhir.

Tujuan utama pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan pemuda mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya secara optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan prestasi, perluasan peran pemuda dalam masyarakat, penguatan organisasi kepemudaan, serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Orientasi pembangunan diarahkan tidak hanya untuk menciptakan pemuda yang kompetitif, tetapi juga berkarakter, memiliki kepekaan sosial, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem perencanaan pembangunan kepemudaan yang terukur dan berjenjang – meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan panjang – sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelayanan kepemudaan harus mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan kepemudaan diarahkan pada penguatan *soft skills*

maupun *hard skills* pemuda. Aspek *soft skills* mencakup pengembangan karakter, kepemimpinan, patriotisme, profesionalitas, serta kepedulian sosial. Sementara itu, *hard skills* diperkuat melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan teknis sesuai kebutuhan pasar kerja. Namun, implementasi pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari berbagai hambatan, antara lain:

1. **Tingginya pemuda yang menjadi korban kejahatan dan mengalami keluhan kesehatan**, di mana proporsinya berada di atas rata-rata nasional.
2. **Kewirausahaan pemuda masih didominasi usaha skala kecil**, dengan rendahnya jumlah pemuda yang menjalankan usaha bersama tenaga kerja tetap.
3. **Kompetensi tenaga kerja muda masih perlu ditingkatkan**, terlihat dari rendahnya proporsi pemuda dalam kategori pekerjaan profesional (*white collar*).
4. **Pengangguran pemuda masih menjadi persoalan signifikan**, terutama di wilayah perkotaan dan lebih banyak dialami pemuda laki-laki.

Keseluruhan tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan perlu dirancang secara lebih komprehensif, lintas sektor, serta berbasis bukti agar pemuda benar-benar dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks Kabupaten Sleman, berbagai isu strategis lokal semakin menegaskan urgensi penguatan kebijakan kepemudaan yang lebih progresif dan adaptif. Salah satu tantangan yang mengemuka adalah berkembangnya karakter generasi "*strawberry*" dan budaya instan yang melemahkan daya saing pemuda dalam menghadapi kompetisi global. Fenomena sosial seperti *klithih*, kenakalan remaja, penyalahgunaan alkohol dan narkoba turut menambah beban isu kepemudaan yang harus segera ditangani secara komprehensif.

Selain itu, tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menunjukkan tren yang masih belum optimal. Minimnya minat pemuda untuk bergabung dalam wadah organisasi serta keterbatasan tenaga profesional dalam pengelolaan organisasi menjadi hambatan

struktural untuk menciptakan ekosistem pengembangan kepemimpinan pemuda yang lebih kuat.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepemudaan juga belum sepenuhnya maksimal. Padahal, generasi muda kini hidup dalam era digital yang menuntut adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi dan media sosial sebagai ruang baru partisipasi.

Lebih jauh, akses terhadap pendidikan kecakapan hidup, pelatihan keterampilan, dan dukungan kewirausahaan masih belum merata. Banyak pemuda yang belum memperoleh kesempatan memadai untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi, sejalan dengan isu nasional terkait kualitas tenaga kerja muda dan rendahnya proporsi pemuda dengan keahlian profesional.

Rangkaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika lokal sekaligus selaras dengan arah kebijakan nasional. Integrasi antara penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda menjadi strategi utama agar generasi muda Sleman mampu tampil sebagai motor penggerak pembangunan yang berkarakter, produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

3.2 METODOLOGI PERHITUNGAN IPP

Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan metodologis yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data (Bulmer, 1984). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan landasan data yang akurat, komprehensif, dan relevan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman.

Metodologi yang digunakan melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu: pengumpulan data sekunder, validasi dan verifikasi data, analisis indikator IPP, serta interpretasi hasil dalam konteks pembangunan daerah. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah terkait (PUPR, 2017).

Dalam rangka meningkatkan akurasi dan relevansi data, proses penyusunan ini juga melibatkan konsultasi dengan para

pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, akademisi, serta instansi pemerintah daerah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan hasil akhir ini tidak hanya mencerminkan kondisi faktual pembangunan pemuda, tetapi juga mampu menjadi rujukan strategis dalam penyusunan program dan kebijakan kepemudaan di tahun-tahun mendatang.

Berikut merupakan metodologi penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025.

3.2.1 Tahap Persiapan

Tahapan persiapan merupakan serangkaian aktivitas awal yang dilakukan guna menunjang pelaksanaan suatu kegiatan, mencakup aspek teknis maupun non-teknis, yang akan menjadi fondasi bagi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan pada tahap ini direncanakan selesai dalam kurun waktu satu bulan pertama sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK).

Dalam perumusan metodologi, terdapat empat komponen utama yang akan dijelaskan, yaitu:

1. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini;
2. Teknik pengumpulan data yang menggambarkan mekanisme memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk mendukung analisis;
3. Tahapan analisis yang mencakup metode dan prosedur yang akan diterapkan dalam mengolah data; serta
4. Rencana kerja yang disusun untuk memfasilitasi proses penyusunan dokumen Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2025.

Tahap persiapan dalam penyusunan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 mencakup tiga kegiatan utama, yang masing-masing memiliki tujuan, metode pelaksanaan, langkah operasional, serta keluaran yang diharapkan sebagai dasar untuk tahap pelaksanaan berikutnya.

1. Koordinasi Awal antara Tim Penyusun dan Tim Teknis

Kegiatan awal ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang efektif antara tim penyusun dengan tim teknis yang terlibat, sekaligus menyepakati

rencana kerja dan metodologi yang akan digunakan selama proses penyusunan (Desrosières, 2009). Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi awal terkait kondisi IPP Kabupaten Sleman.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa diskusi dan koordinasi intensif antara para pihak terkait.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Diskusi terkait kesiapan tim dalam melaksanakan keseluruhan ruang lingkup kegiatan dan kebutuhan teknis yang harus dipenuhi.
- b. Penyamaan pemahaman mengenai tugas dan peran tim penyusun dalam keseluruhan proses kerja.
- c. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini berupa dokumen rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati bersama, serta data awal yang relevan dengan IPP Kabupaten Sleman.

2. Penyusunan Desain Survei dan Format Kegiatan

Kegiatan ini diarahkan pada perumusan desain survei yang diperlukan dalam proses pengumpulan data, serta penyusunan format-format kerja, baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk pengelolaan data dan informasi. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan instrumen yang tepat untuk mendukung proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis (Neuman, 2000).

Metode pelaksanaan dilakukan melalui diskusi dan koordinasi lintas tim. Tahapan pelaksanaan mencakup:

- a. Penyamaan persepsi mengenai data sekunder yang telah tersedia dan kesepakatan atas penggunaannya.
- b. Penegasan kembali mengenai tugas dan cakupan kerja tim penyusun.
- c. Penyusunan dan penyempurnaan desain survei.

- d. *Output* dari kegiatan ini berupa data sekunder yang dapat digunakan dalam analisis awal serta format desain survei yang siap diterapkan.

3. Penyiapan Referensi IPP Kabupaten Sleman

Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan dan penyusunan referensi yang berkaitan dengan IPP Kabupaten Sleman, yang akan digunakan sebagai dasar acuan dalam proses analisis dan penyusunan dokumen teknis (Efendi, 2020).

Metode pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan instansi atau pihak-pihak yang relevan.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan atau institusi penyedia data IPP.
- b. Penyamaan persepsi dan kesepakatan terhadap referensi yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen.
- c. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya gambaran awal mengenai IPP Kabupaten Sleman yang menjadi acuan dalam penyusunan.

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025. Kegiatan ini mencakup proses pendataan yang terfokus pada masing-masing domain penyusun IPP, baik melalui pengumpulan data primer maupun sekunder, sesuai dengan kebutuhan analisis (Corbin & Morse, 2003).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperoleh data yang valid, relevan, dan mutakhir guna mendukung penyusunan dokumen secara komprehensif.

Metode yang digunakan dalam proses ini meliputi:

- 1. Kunjungan instansional, yakni pengumpulan data langsung melalui kunjungan ke instansi terkait yang memiliki otoritas terhadap data dimaksud.
- 2. Penggunaan kuesioner luring maupun daring dengan memanfaatkan media seperti Google Form.

3. Kompilasi data, yaitu proses penghimpunan data sekunder dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan, publikasi statistik, dan dokumen perencanaan yang relevan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kumpulan data primer dan sekunder yang mencerminkan kondisi objektif pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman berdasarkan domain IPP.

3.2.3 Acuan Teknis Formulasi IPP Peninjauan Ulang 2025

Sebagai acuan teknis, berikut ini disajikan **tabel kebutuhan data** yang diperlukan dalam menunjang penyusunan IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025.

Tabel 3.4 Kebutuhan Data Penyusun IPP Kabupaten Sleman 2025

Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan / kursus / training dan memperoleh sertifikat	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Persentase pemuda berusia 19-30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA / sederajat (termasuk pendidikan tinggi)	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap proporsi populasi pemuda	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda usia 16-30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda yang berolahraga	Persentase pemuda yang melakukan olah raga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda	BPS Kabupaten Sleman/Kuesioner
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan usia 15-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah / pernah kawin	BPS Kabupaten Sleman

Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Rasio kewirausahaan pemuda	Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya	BPS Kabupaten Sleman/Kuesioner
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya	BPS Kabupaten Sleman/Kuesioner
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
Inklusivitas dan Kesenjangan Gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait
	Persentase perkawinan anak	Proporsi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun	BPS Kabupaten Sleman/OPD terkait

Dalam konteks perhitungan nilai IPP, pengolahan data dilanjutkan dengan penetapan skor untuk setiap indikator berdasarkan nilai minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Misalnya, indikator "persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat" dalam satu dekade terakhir menunjukkan kisaran 4% hingga 20%. Jika nilai maksimum indikator ini secara teoritis ditetapkan sebesar 100%, maka akan muncul ketimpangan antara kondisi riil di lapangan dengan target yang digunakan sebagai patokan.

Penetapan target maksimum 100% untuk indikator semacam ini dapat dianggap tidak realistis, terutama karena tren capaian aktual menunjukkan fluktuasi yang tinggi dan variasi yang lebar antarwilayah. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, pencapaian 100% hampir mustahil diraih. Konsekuensinya, bila target maksimal tetap menggunakan angka tersebut, maka nilai indeks yang dihasilkan akan cenderung rendah dan tidak merepresentasikan capaian yang sebenarnya, karena nilai indeks menjadi sangat sensitif terhadap kesenjangan dengan angka maksimum yang terlalu tinggi.

Tabel 3.5 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP

Domain	Indikator	Batas Min	Batas Maks
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0	40,89
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	0	92,95
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0	100
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	60,39	0
	Persentase pemuda yang merokok	53,18	3,63
	Persentase pemuda yang berolahraga	0	70
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	49,01	0
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	53	10
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	76	20
	Rasio kewirausahaan pemuda	0	2,5
Partisipasi dan kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	0	100
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0	18,5
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0	4
Inklusivitas dan kesetaraan gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0	100
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	0	58
	Persentase perkawinan anak	68,99	0

Sumber: Laporan Peninjauan Ulang IPP, Kemenpora, 2025

Dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), penetapan nilai maksimum dan minimum pada setiap indikator berfungsi sebagai acuan untuk mendekati kondisi ideal, di mana nilai IPP secara teoritis berada pada angka 100. Penetapan ini menjadi dasar dalam proses normalisasi nilai

indikator agar dapat dibandingkan dan diakumulasi secara proporsional dalam struktur IPP.

Untuk indikator yang menunjukkan kinerja positif seiring dengan peningkatan nilai (misalnya, tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan), maka nilai maksimum ditetapkan sebagai target yang mencerminkan capaian ideal. Sebaliknya, untuk indikator yang menunjukkan kinerja yang semakin baik ketika nilainya menurun (seperti tingkat pengangguran pemuda atau angka kekerasan terhadap pemuda), maka nilai minimum dijadikan sebagai target capaian.

Melalui pendekatan ini, seluruh nilai indikator akan dinormalisasi berdasarkan rentang nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Hasil normalisasi ini digunakan untuk menghitung skor masing-masing indikator, kemudian diakumulasi menjadi nilai pada tingkat domain, dan akhirnya membentuk nilai IPP secara keseluruhan. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa setiap indikator berkontribusi secara proporsional terhadap penilaian akhir IPP, sesuai dengan karakteristik dan arah capaian yang diharapkan dari masing-masing indikator.

Adapun metode yang digunakan dalam perhitungan IPP ini adalah dengan mengkombinasikan angka minimum dan maksimum bernilai 0 dan 100 beserta tren data. Berikut merupakan formula untuk menormalisasikan indikator apabila indikator memiliki arah positif.

$$z_{ji} = 100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ij(max)} - X_{ij(min)}}$$

Sementara apabila indikator memiliki arah negatif, formulasinya adalah:

$$z_{ji} = \left(-100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ij(max)} - X_{ij(min)}} \right) + 100$$

Setelah semua nilai indikator telah berhasil dihitung, selanjutnya dilakukanlah perhitungan nilai pada capaian masing-masing domain. Metode yang digunakan dalam perhitungan nilai domain adalah metode agregasi aritmetik. Formulasi yang digunakan pada tingkat domain adalah sebagai berikut:

$$r_j = \sum_{k=1}^m w_{ijnk} x_{jnk}$$

r_{ijn} : Nilai indeks pada domain

w_{ij} : Bobot pada masing-masing indikator

X_{ij} : Indikator nomor-j pada domain -i

Lalu, formulasi pada tingkat indeks adalah sebagai berikut

$$IPP_i = \sum_{k=1}^m w_{ti} r_i$$

IPP_i : Nilai indeks IPP

w_{ti} : Bobot pada masing-masing domain

Dalam melengkapi komponen-komponen Indikator penyusun IPP yang hingga saat ini belum masuk dalam survey Sakernas maupun Susenas BPS serta belum tersedia pada katalog data OPD, maka perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan media online (google Form) untuk menjangkau secara cepat dan tepat responden usia pemuda 16-30 tahun dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman. Survei Pemuda Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui formulir kuesioner online pada periode 5 November 2025 hingga 21 November 2025. Sasaran survei adalah pemuda berusia 16-30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pemilihan responden dilakukan dengan mengacu pada prinsip probabilitas secara random, sehingga setiap pemuda yang memenuhi kriteria memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden.

Dalam metodologi survei kuantitatif, *probability sampling* merupakan pendekatan dasar untuk memastikan bahwa sampel dapat mewakili populasi secara objektif. *Probability sampling* memberikan *equal chance of selection* (peluang pemilihan yang setara), sehingga setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang terukur untuk menjadi responden. Secara teoretis, model ini meminimalkan bias seleksi dan memungkinkan penggunaan inferensi statistik, termasuk estimasi proporsi dan penghitungan *margin of error*. Semakin acak proses pemilihannya, semakin besar kemampuan sampel untuk merepresentasikan populasi, karena distribusi responden mengikuti pola populasi secara natural tanpa dipengaruhi preferensi peneliti.

Pendekatan ini juga sesuai dengan teori dasar dari *sampling representatif*, yaitu bahwa karakteristik sampel

akan mendekati karakteristik populasi apabila setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dengan demikian, hasil survei dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang lebih kuat, reliabel, dan dapat digeneralisasikan.

Selain probabilitas, survei ini juga mengacu pada kerangka teori distribusi spasial yang merata, khususnya pada konteks wilayah administratif. Dalam survei wilayah, keterwakilan geografis sangat penting agar hasil tidak condong pada daerah yang lebih padat atau lebih aktif secara digital saja. Teori dasar dari *stratified spatial distribution* menyatakan bahwa pembagian responden ke unit-unit wilayah (misalnya kecamatan) membantu menjaga representativitas spasial, sehingga setiap wilayah mempunyai kesempatan kontribusi yang setara terhadap keseluruhan hasil survei.

Model ini juga dikenal sebagai *stratified random sampling by region*, di mana kecamatan diperlakukan sebagai strata, dan responden didorong untuk tersebar secara proporsional atau minimal merata untuk menghindari bias wilayah (*geographical bias*). Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi standard metodologi survei wilayah menurut Dillman (*Tailored Design Method*), yang menekankan bahwa distribusi responden yang merata memperkuat validitas data karena perbedaan karakter demografis atau sosial di setiap wilayah dapat terakomodasi.

Atas dasar teori tersebut, survei ini berupaya menyebarkan responden secara merata di seluruh kecamatan berikut:

1. Kecamatan Sleman
2. Kecamatan Mlati
3. Kecamatan Kalasan
4. Kecamatan Tempel
5. Kecamatan Turi
6. Kecamatan Moyudan
7. Kecamatan Seyegan
8. Kecamatan Pakem
9. Kecamatan Depok
10. Kecamatan Prambanan

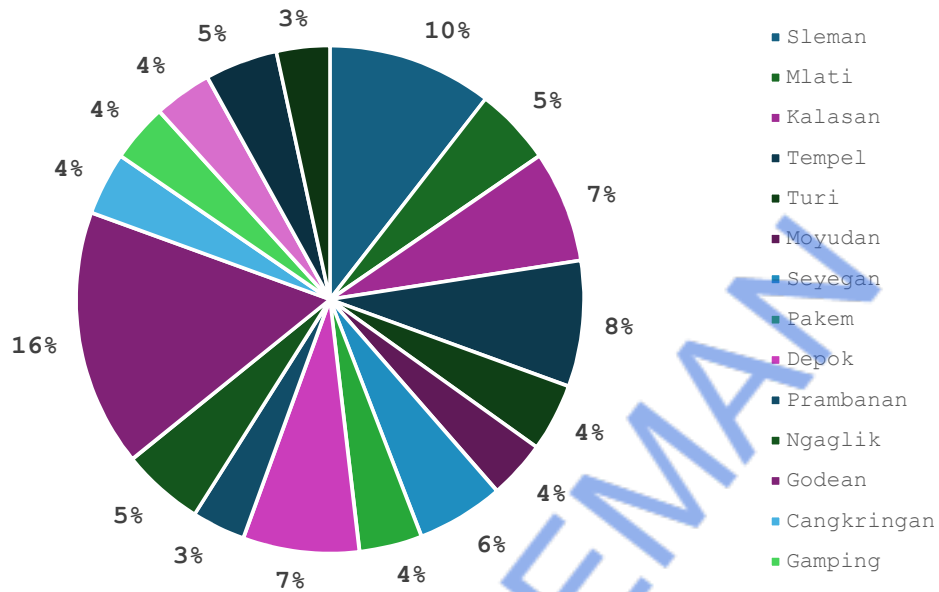
11. Kecamatan Ngaglik
12. Kecamatan Godean
13. Kecamatan Cangkringan
14. Kecamatan Gamping
15. Kecamatan Berbah
16. Kecamatan Minggir
17. Kecamatan Ngemplak

Pendekatan metodologis ini memastikan bahwa survei tidak hanya representatif secara demografis (usia dan jenis kelamin), tetapi juga representatif secara spasial, sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi pemuda Kabupaten Sleman secara utuh.

Tabel 3.6 Persebaran Jumlah Responden

Kecamatan	Jumlah Responden
Sleman	34
Mlati	16
Kalasan	23
Tempel	26
Turi	14
Moyudan	12
Seyegan	18
Pakem	13
Depok	24
Prambanan	11
Ngaglik	17
Godean	53
Cangkringan	13
Gamping	12
Berbah	12
Minggir	15
Ngemplak	11
Total	324

Sumber: Analisis Penyusun, 2025



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar 3.5 Persebaran Jumlah Responden

Jumlah responden dalam survei ini mencapai **324 orang**. Jika dibagi secara proporsional ke dalam **17 kecamatan**, maka secara matematis setiap kecamatan idealnya menyumbang sekitar **19 responden**. Namun, pola sebaran aktual menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok.

Beberapa kecamatan memiliki jumlah responden **jauh di atas rata-rata**, seperti **Godean (53 responden)**, **Depok (24 responden)**, dan **Sleman (34 responden)**. Sebaliknya, terdapat kecamatan yang kontribusi respondennya **lebih rendah dari angka proporsional**, yakni **Prambanan (11 responden)**, **Ngemplak (11 responden)**, **Gamping (12 responden)**, serta **Berbah (12 responden)**. Ketimpangan distribusi ini menimbulkan sejumlah konsekuensi teknis terhadap kualitas dan interpretasi data survei.

Secara lebih rinci, implikasi teknis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dominasi kecamatan dengan responden besar.

Estimasi pada tingkat kabupaten cenderung dipengaruhi oleh kecamatan dengan jumlah responden tinggi. Misalnya, Godean sendiri merepresentasikan sekitar 16,4% dari total responden, sehingga corak karakteristik pemudanya berpotensi memberi bobot berlebihan terhadap hasil agregat kabupaten.

2. Representasi kecamatan kecil yang belum mencerminkan keragaman pemuda.

Kecamatan dengan jumlah responden yang terbatas kemungkinan belum menggambarkan variasi sosial, pendidikan, ekonomi, maupun dinamika pekerjaan pemuda secara memadai. Keterbatasan ini berpotensi membuat profil kecamatan tersebut kurang komprehensif.

3. Keterandalan untuk analisis kecenderungan, namun bukan untuk inferensi absolut.

Secara umum, survei masih dapat dimanfaatkan untuk membaca pola atau kecenderungan pemuda di tingkat kabupaten. Namun, penarikan inferensi yang bersifat absolut atau generalisasi kabupaten tidak dapat dilakukan tanpa metode penyesuaian, seperti penerapan *weighting* berdasarkan proporsi populasi kecamatan.

4. Konsekuensi terhadap interpretasi usia dan variabel lain.

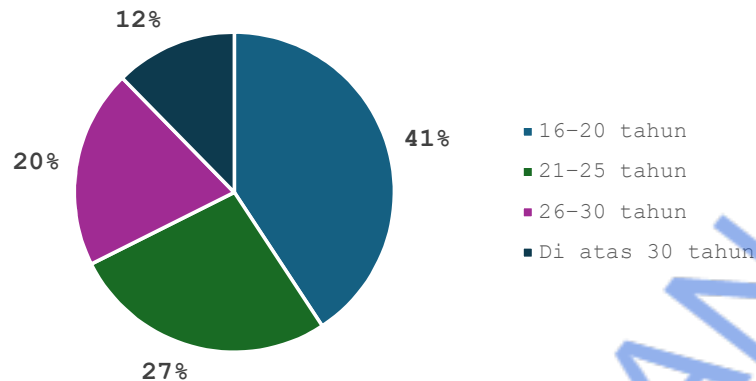
Ketimpangan distribusi responden antarwilayah juga dapat memengaruhi interpretasi teknis terhadap komposisi usia responden dan variabel penting lainnya. Kecamatan dengan jumlah responden kecil mungkin tidak menunjukkan spektrum usia yang cukup beragam, sehingga perlu kehati-hatian dalam membaca dinamika demografis pada level kabupaten.

Analisis terhadap hasil responden Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman juga ditinjau mengenai sebaran responden berdasarkan kategori usia seperti berikut ini.

Tabel 3.7 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Usia

Kategori Usia	Jumlah Responden
16-20 tahun	132
21-25 tahun	87
26-30 tahun	65
Di atas 30 tahun	40
Total	324

Sumber: Analisis Penyusun, 2025



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar 3.6 Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Usia

Proporsi usia dalam suatu survei kepemudaan merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa gambaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi populasi pemuda secara objektif. Dalam distribusi responden saat ini, terlihat pola sebagai berikut:

1. Usia 16-20 tahun = 40,7%

Kelompok ini didominasi oleh pemuda yang masih berada dalam fase pendidikan formal, sehingga cenderung memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang relatif homogen.

2. Usia 21-25 tahun = 26,8%

Segmen ini berada pada tahap transisi antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, sehingga memiliki variasi kondisi yang lebih tinggi terkait pilihan karier, keaktifan berorganisasi, maupun dinamika sosial-ekonomi.

3. Usia 26-30 tahun = 20,1%

Kelompok ini umumnya telah memasuki pasar kerja atau fase awal kemandirian ekonomi. Namun representasinya dalam survei relatif kecil jika dibandingkan dengan porsi riil populasi pemuda.

4. Usia di atas 30 tahun = 12,3%

Kelompok ini secara definisi tidak termasuk dalam frame population Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), sehingga keberadaannya dalam data berpotensi mengaburkan interpretasi jika tidak diproses dengan benar.

Secara lebih rinci, implikasi teknis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Over-representasi kelompok usia muda (16–20 tahun)

Porsi yang terlalu besar dari kelompok usia ini dapat menyebabkan bias ke arah indikator pendidikan yang tampak lebih baik daripada kondisi sebetulnya. Hal ini karena kelompok ini relatif belum masuk pasar kerja dan belum sepenuhnya menghadapi persoalan ekonomi maupun sosial yang lebih kompleks.

2. Under-representasi kelompok usia produktif (26–30 tahun)

Rendahnya keterwakilan kelompok yang umumnya sudah bekerja ini dapat menurunkan ketepatan pengukuran terkait isu ketenagakerjaan, pendapatan, kemandirian, serta partisipasi sosial dan politik. Kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak menggambarkan realitas pemuda usia dewasa awal secara akurat.

3. Responden berusia > 30 tahun harus dieksklusi dari perhitungan IPP

Karena tidak termasuk dalam batasan usia pemuda secara resmi, responden dalam kategori ini wajib dikeluarkan pada tahap data cleaning. Apabila tidak dihapus, keberadaannya dapat menciptakan distorsi pada indikator, terutama yang terkait ekonomi dan partisipasi.

Interpretasi teknis dari distribusi responden per kecamatan dan per usia, dilanjutkan dengan perhitungan *Margin of Error* (MoE) secara formal menggunakan pendekatan justifikasi Non Parametrik.

Justifikasi Non-Parametrik atas kemungkinan *error survey* ketika data survei:

1. tidak diambil melalui *probability sampling* murni,
2. jumlah responden tiap kecamatan tidak proporsional terhadap populasi sebenarnya,
3. atau ketika karakteristik responden tidak dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu (misalnya normal).

Pada data survei ini terdapat beberapa potensi error non-parametrik, yaitu:

1. Error Representativitas Wilayah (*Spatial Sampling Error*)

Distribusi responden antar-kecamatan tidak proporsional.

Contoh ekstrem:

- a. Godean = 53 responden
- b. Prambanan = 11 responden
- c. Ngemplak = 11 responden

Hal ini membuka kemungkinan *over-representation* atau *under-representation* karakteristik pemuda dari kecamatan tertentu. Efeknya, estimasi kabupaten dapat bias ke arah kecamatan dengan jumlah responden besar.

2. Error Struktur Usia (*Age Distribution Error*)

Permasalahan ini menyangkut hal dimana terjadi distribusi usia responden yang tidak merata

Tabel 3.8 Distribusi Usia Responden

Usia	Jumlah
16-20 tahun	132
21-25 tahun	87
26-30 tahun	65
> 30 tahun	40

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Survei IPP seharusnya hanya mencakup pemuda 16-30 tahun, namun terdapat 40 responden di luar usia pemuda (12,3%). Jika tidak disaring, ini menghasilkan out-of-frame error.

3. Voluntary Response Bias (*Self-Selection Error*)

Responden berasal dari kuesioner online, sehingga kemungkinan besar:

- a. lebih mewakili pemuda yang memiliki akses internet,
- b. lebih aktif secara digital,
- c. lebih berpendidikan,
- d. cenderung lebih vokal dalam isu sosial.

Mereka tidak mewakili pemuda offline yang justru sering menjadi kelompok paling rentan.

4. Nonresponse Error

Tidak semua pemuda Sleman berpeluang sama untuk mengisi kuesioner.

Misalnya:

- a. pemuda pekerja fisik,
- b. pemuda yang tidak sekolah,
- c. pemuda disabilitas,
- d. lebih kecil peluangnya untuk merespon survei online.

5. Coverage Error

Survei online tidak mencakup pemuda yang:

- a. tidak punya HP,
- b. tidak punya kuota,
- c. tidak aktif di media sosial.

Kelompok ini jumlahnya tidak besar, tetapi tetap menimbulkan *coverage bias*.

Dengan mempertimbangkan adanya beberapa error yang terjadi di atas, maka diperlukan adanya perhitungan *Margin of Error* (MoE). *Margin of Error* (MoE) merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil survei menyimpang dari kondisi populasi sebenarnya (Hazra, 2017). MoE menjadi penting terutama ketika survei digunakan untuk menggambarkan kondisi umum pemuda di Kabupaten Sleman.

"After collecting the data, the margin of error is used to create a **confidence interval** around each result. This range accounts for random sampling error". Misalnya: Sebuah survei mungkin melaporkan bahwa 50% orang mendukung undang-undang baru, dengan margin kesalahan +/- 3 poin persentase. Ini berarti interval kepercayaan 95% berkisar antara 47% hingga 53%. Para peneliti yakin bahwa persentase sebenarnya dari seluruh populasi yang mendukung undang-undang tersebut berada dalam rentang spesifik ini.

Perhitungan *Margin of Error* (MoE) menggunakan rumus survei sederhana sebagai berikut:

$$MoE = Z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Dengan $Z = 1,96$ untuk kepercayaan 95%.

Untuk maximum variance $p = 0,5$ (paling konservatif):

$$MoE = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.25}{324}}$$

$$MoE = 1.96 \times 0.0277 = 0.0543$$

Margin of Error = $\pm 5,43\%$. Artinya, setiap indikator dari survei ini memiliki kemungkinan sampling error sekitar $\pm 5,4$ poin persentase.

Adapun beberapa catatan penting berkaitan dengan perhitungan *Margin of Error* (MoE) ini adalah:

1. Karena survei ini *non-probability sampling*, MoE bukan margin of error statistik murni, tetapi *approximate margin of error* (aMoE).
2. Error sebenarnya lebih besar, karena adanya bias representativitas, bias digital, dan *coverage error*.

Berdasarkan karakteristik survei yang menggunakan mekanisme *non-probability sampling*, estimasi *adjusted Margin of Error* (aMoE) yang paling masuk akal berada pada kisaran sekitar 7% hingga 10%. Rentang ini lebih mencerminkan kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip acak sempurna (*random selection*), sehingga tingkat ketidakpastian statistik cenderung lebih besar dibanding survei berdesain probabilistik.

Survei ini tetap memiliki nilai informatif yang signifikan untuk memahami berbagai pola umum, preferensi, dan kecenderungan sikap pemuda di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, hasilnya masih relevan untuk menghasilkan *policy insight* dan pemahaman awal mengenai dinamika kepemudaan.

Namun demikian, temuan survei belum dapat diperlakukan sebagai representasi penuh populasi kabupaten secara statistik formal. Untuk mencapai tingkat representativitas tinggi, diperlukan prosedur tambahan seperti *weighting*, *post-stratification*, atau model penyesuaian lain yang mengoreksi ketidakseimbangan sampel.

Beberapa sumber potensi bias yang mempengaruhi kualitas estimasi meliputi:

1. Distribusi responden antar kecamatan yang tidak proporsional, di mana kecamatan dengan jumlah responden besar memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan terhadap agregasi kabupaten.

2. Ketimpangan struktur usia responden, terutama keberlimpahan responden usia muda, yang dapat menyebabkan indikator pendidikan atau partisipasi belajar tampak lebih baik dibanding kondisi populasi sebenarnya.
3. *Self-selection bias* akibat metode rekrutmen digital, yang memungkinkan responden lebih didominasi oleh kelompok yang aktif secara daring dan memiliki preferensi partisipasi lebih tinggi.
4. *Nonresponse error*, yaitu individu yang seharusnya masuk dalam *frame* populasi tetapi tidak berpartisipasi sehingga menciptakan kekosongan representasi.
5. *Coverage error*, terkait keterjangkauan responden dari wilayah atau kelompok sosial tertentu yang memiliki akses terbatas terhadap saluran rekrutmen survei.

Secara matematis, margin of error murni berdasarkan ukuran sampel menghasilkan angka $\pm 5,4\%$, tetapi ketika mempertimbangkan seluruh sumber ketidakpastian dari bias non-probabilistik, MoE yang lebih realistis berada pada rentang $\pm 7\%$ hingga $\pm 10\%$.

Oleh karena itu, temuan survei dapat digunakan sebagai data estimatif yang memberikan gambaran arah, pola, dan kecenderungan umum pemuda di Sleman. Namun, hasil tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai angka absolut populasi tanpa prosedur penyesuaian statistik yang memadai.

Berikut merupakan indikator-indikator di dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman yang dihitung menggunakan hasil dari kuesioner.

3.2.3.1 Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas (Sosial Masyarakat)

Berdasarkan koreksi sampling di atas, apabila terdapat 86,7% responden menyatakan Pernah mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal (RT/RW/dusun/kelurahan) dalam 3 bulan terakhir dan 13,3% menyatakan tidak. lakukan analisis untuk menyesuaikan reduksi terhadap kemungkinan *error* dari *sampling*.

Dalam hal ini Dari perhitungan sebelumnya, **MoE survei = $\pm 5,3\%$** (asumsi MoE yang telah Anda hitungkan pada tahap sebelumnya).

Terdapat dua proporsi hasil survei:

1. **Pernah ikut kegiatan sosial:** 86,7%

$$\text{Proporsi Riil} = p \pm \text{MoE}$$

$$p = 86,7\%$$

$$\text{MoE} = \pm 5,3\%$$

Maka:

$$\text{a. Batas bawah: } 86,7\% - 5,3\% = 81,4\%$$

$$\text{b. Batas atas: } 86,7\% + 5,3\% = 92,0\%$$

$$\text{Jadi, Proporsi riil: } 81,4\% - 92,0\%$$

2. **Tidak pernah:** 13,3%

$$\text{Proporsi Riil} = p \pm \text{MoE}$$

$$p = 13,3\%$$

$$\text{MoE} = \pm 5,3\%$$

Maka:

$$\text{a. Batas bawah: } 13,3\% - 5,3\% = 8,0\%$$

$$\text{b. Batas atas: } 13,3\% + 5,3\% = 18,6\%$$

$$\text{Jadi, Proporsi riil: } 8,0\% - 18,6\%$$

Dengan demikian, persentase sebenarnya (di populasi pemuda Sleman) yang **aktif mengikuti kegiatan sosial** kemungkinan berada di antara **81,4% hingga 92,0%**. Sementara itu, yang **tidak mengikuti kegiatan sosial** kemungkinan berada di antara **8,0% hingga 18,6%**. Artinya, meskipun survei menunjukkan 86,7% responden ikut kegiatan sosial, angka riil di populasi dapat sedikit lebih rendah atau lebih tinggi karena variabilitas sampel.

3.2.3.2 Persentase Pemuda Aktif Mengikuti Kegiatan Organisasi

Berikutnya, dari sumber kuesioner daring tersebut, akan dihitung pula Persentase pemuda aktif yang mengikuti kegiatan organisasi. Berdasarkan potensi MoE tersebut selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap persentase pemuda aktif dalam sebuah organisasi di luar tempat kerja atau di luar sekolah/kampus (misalnya karang taruna, organisasi keagamaan, komunitas, kelompok hobi, atau LSM), dimana terdapat 79,9% yang menjawab ya.

Dalam analisis survei, estimasi proporsi yang diperoleh dari sampel tidak dapat langsung dianggap identik dengan nilai sebenarnya di populasi. Oleh karena itu, diperlukan penghitungan interval estimasi dengan menggunakan *Margin of Error* (MoE). Interval ini memberikan rentang nilai di mana proporsi populasi yang sesungguhnya kemungkinan besar berada.

Rumus umum yang digunakan:

$$\text{Proporsi Riil} = p \pm \text{MoE}$$

Dengan:

- $p = 79,9\%$ (proporsi responden yang menyatakan aktif berorganisasi)
- *Margin of Error* $\pm 5,3\%$

1. Perhitungan Batas Bawah (Lower Bound)

$$79,9\% - 5,3\% = 74,6\%$$

2. Perhitungan Batas Atas (Upper Bound)

$$79,9\% + 5,3\% = 85,2\%$$

Proporsi riil pemuda Sleman yang aktif berorganisasi berada pada kisaran: 74,6% – 85,2%. Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa 79,9% pemuda aktif dalam organisasi, angka sebenarnya di populasi pemuda Sleman, setelah mempertimbangkan potensi sampling error, diperkirakan berada di rentang:

- Minimal 3 dari 4 pemuda (74,6%), hingga
- Mendekati 9 dari 10 pemuda (85,2%)

Ini menunjukkan tingkat aktivitas organisasi yang sangat tinggi, dengan variasi yang masih dalam kategori kuat meskipun ada ketidakpastian sampel.

3.2.3.3 Persentase Pemuda yang Berolahraga (≥ 1 kali dalam 7 hari terakhir)

Data: Indikator "Persentase pemuda yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir" digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas fisik minimal di kalangan pemuda. Aktivitas olahraga dalam konteks ini mencakup seluruh bentuk kegiatan fisik yang dilakukan secara terencana maupun tidak terstruktur, selama memenuhi definisi aktivitas olahraga ringan hingga berat, seperti:

- jogging atau lari,

- bersepeda,
- senam,
- sepak bola atau futsal,
- badminton,
- *workout* atau *gym*,
- senam lantai,
- atau bentuk aktivitas fisik lain yang meningkatkan detak jantung.

Indikator ini penting karena aktivitas fisik merupakan salah satu determinan utama dalam kesehatan pemuda. Aktivitas itu berkontribusi pada kebugaran, kesehatan mental, kapasitas kerja, dan produktivitas jangka panjang.

Survei menanyakan: "Apakah Anda melakukan olahraga sedikitnya satu kali dalam seminggu terakhir?"

Jawaban dikodekan menjadi:

- 1 = Ya (melakukan olahraga minimal sekali)
- 0 = Tidak

Hasil raw data menunjukkan 71,1% pemuda menjawab "Ya".

Dalam survei dengan jumlah responden 324 orang, terdapat potensi sampling error yang menggambarkan deviasi antara hasil sampel dengan kondisi populasi pemuda Kabupaten Sleman secara keseluruhan. Melalui pendekatan statistik non-parametrik dan formula standar MoE untuk proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh nilai:

$$\text{MoE} = \pm 5,3\%$$

Artinya, hasil survei bisa bergeser lebih tinggi atau lebih rendah hingga 5,3 poin persentase ketika diestimasi untuk seluruh populasi.

Perhitungan Kisaran Estimatif Persentase Riil, diketahui hasil survei:

$$p = 71,1\%$$

Dengan MoE: $\pm 5,3\%$

- Batas Bawah (Lower Bound) = $71,1\% - 5,3\% = 65,8\%$
- Batas Atas (Upper Bound) = $71,1\% + 5,3\% = 76,4\%$

Dengan mempertimbangkan Margin of Error, maka, persentase riil pemuda Sleman yang melakukan olahraga

sedikitnya sekali dalam seminggu terakhir berada di kisaran antara 65,8% hingga 76,4%.

Sehingga secara interpretatif :

1. Angka 65,8% menggambarkan skenario konservatif, yaitu minimal sekitar dua pertiga pemuda terbukti beraktivitas fisik secara teratur.
2. Angka 76,4% menggambarkan skenario optimis – yaitu potensi bahwa lebih dari tiga perempat pemuda memiliki kebiasaan olahraga mingguan.
3. Rentang estimasi ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik pemuda Sleman cukup tinggi dan relatif stabil meskipun terdapat variasi sampel.



4- CAPAIAN NILAI DOMAIN IPP KABUPATEN SLEMAN 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran yang dihitung berdasarkan kinerja masing-masing indikator dalam lima domain utama IPP. Sebagai instrumen evaluasi yang bersifat strategis, IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat perkembangan, kapasitas, serta kualitas hidup pemuda Sleman di berbagai dimensi pembangunan.

Melalui IPP, pemerintah daerah dapat melihat seberapa besar kontribusi faktor-faktor seperti akses dan kualitas pendidikan formal maupun nonformal, derajat kesehatan dan perilaku hidup sehat pemuda, peluang serta partisipasi dalam sektor ketenagakerjaan, intensitas keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan, hingga aspek inklusivitas dan kesetaraan yang menentukan ruang partisipasi yang adil bagi seluruh kelompok pemuda. Pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan indikator ini sangat penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan kepemudaan Sleman lebih responsif,

inklusif, serta mampu menjawab tantangan struktural maupun dinamika sosial yang terus berkembang.

Pada bagian ini akan diuraikan capaian dari 16 indikator penyusun IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025. Masing-masing indikator memiliki fungsi strategis dalam menggambarkan kondisi aktual pada setiap domain, sekaligus menunjukkan kontribusi relatifnya terhadap nilai IPP Sleman secara keseluruhan. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan mampu memperkuat ekosistem pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman.

4.1 DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Domain Pendidikan dan Pelatihan merupakan fondasi utama dalam pembangunan pemuda karena menentukan kualitas modal manusia, kemampuan adaptasi, serta kesiapan pemuda menghadapi dinamika pasar kerja. Dalam konteks pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), domain ini tidak hanya menilai capaian pendidikan formal, tetapi juga kompetensi

pelatihan serta keterampilan digital yang semakin krusial di era ekonomi berbasis teknologi. Di Kabupaten Sleman, yang memiliki karakter sebagai kawasan pendidikan, keberadaan domain ini menjadi semakin strategis karena berperan membedakan antara kualitas sumber daya pemuda dengan kapasitas ekonomi wilayah. Secara matematis, kontribusi domain ini terhadap IPP ditentukan melalui normalisasi masing-masing indikator terhadap batas minimum dan maksimum, kemudian dikalikan bobot indikator dan bobot domain. Proses ini memastikan bahwa nilai IPP tidak hanya mencerminkan capaian absolut, namun juga proporsional terhadap standar performa maksimum nasional sehingga memberikan ukuran yang lebih adil, objektif, dan dapat diperbandingkan. Dengan bobot domain sebesar **0,21**, kontribusi Pendidikan dan Pelatihan terhadap total nilai IPP Kabupaten Sleman cukup signifikan, terutama mengingat ketiga indikatornya menggambarkan kesiapan

pemuda dalam pendidikan formal, keterampilan kerja profesional, dan kecakapan TIK – tiga pilar kunci bagi kompetitive advantage pemuda di Sleman.

Tabel 4.1 Pengukuran Domain Pendidikan dan Pelatihan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min – Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0.33	0 – 40.89	Nilai indikator dinormalisasi: $(\text{Capaian} - \text{Min}) / (\text{Maks} - \text{Min})$, lalu dikalikan bobot indikator dan bobot domain 0.21	Indikator ini paling sensitif terhadap kebijakan peningkatan pelatihan vokasional. Jika capaian Sleman relatif rendah, ruang perbaikan besar sehingga peningkatan kecil pun dapat menaikkan IPP secara signifikan.
Persentase pemuda berijazah SMA / sederajat atau lebih tinggi	0.34	0 – 92.95	Normalisasi dilakukan terhadap batas nasional sehingga indikator ini menunjukkan seberapa dekat capaian Sleman dengan standar maksimum pendidikan formal pemuda	Karena Sleman merupakan daerah pendidikan, indikator ini berpotensi menyumbang nilai tinggi dan menjadi penopang utama domain Pendidikan. Penurunan kecil dapat berdampak besar pada nilai akhir IPP karena bobot indikator terbesar.
Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0.33	0 – 100	Dinormalisasi dengan skala penuh (0-100), lalu dikalikan bobot indikator dan bobot domain	Keterampilan TIK menjadi indikator strategis untuk menggambarkan kesiapan pemuda menghadapi ekonomi digital. Jika capaian tinggi, IPP Sleman mendapatkan keuntungan kompetitif dibanding daerah lain.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam analisis ini, masing-masing indikator penopang pada domain Pendidikan dan Pelatihan akan diuraikan secara lebih mendetail, baik dari aspek metodologi pengukuran, nilai capaian, maupun implikasi kebijakan yang relevan bagi Kabupaten Sleman.

4.1.1 Indikator Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat



Estimasi dari BPS Kabupaten Sleman melalui hasil Sakernas menunjukkan bahwa Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat berada pada nilai 40,89%, yang sekaligus merupakan batas maksimum indikator tersebut. Dengan demikian, proses normalisasi menghasilkan nilai transformasi sebesar 100, menandakan capaian optimal dalam skala nasional. Secara

matematis, karena capaian indikator berada tepat pada batas maksimum (40,89), maka nilai transformasi dihitung melalui formula:

$$\text{Transformasi} = \frac{\text{Capaian} - \text{Min}}{\text{Maks} - \text{Min}} \times 100 = \frac{40,89 - 0}{40,89 - 0} \times 100 = 100$$

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah mencapai performa terbaik yang dapat dicapai untuk indikator ini menurut standar IPP nasional. Secara substantif, capaian 40,89% dapat diinterpretasikan bahwa dari setiap 10 pemuda, sekitar 4 pemuda telah memperoleh pelatihan bersertifikat, sebuah proporsi yang cukup tinggi dan memperlihatkan bahwa akses pemuda terhadap pelatihan formal di Sleman tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara luas. Capaian ini memperkuat posisi Sleman sebagai wilayah yang memiliki kesadaran tinggi terhadap peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan profesional, yang pada gilirannya mendukung kualitas ketenagakerjaan dan kesiapan pemuda menghadapi pasar kerja.

Tabel 4.2 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat Kabupaten Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0.33	0	40.89	40.89	100

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Interpretasi substantif dari capaian 40,89 persen atau 4 dari setiap 10 pemuda di Kabupaten Sleman yang telah mengikuti pelatihan bersertifikat menunjukkan bahwa Sleman berada pada kategori sangat baik dalam hal peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan formal. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses pelatihan. Keberhasilan Sleman dalam mencapai batas maksimum indikator ini mencerminkan kuatnya ekosistem pelatihan daerah, mulai dari ketersediaan lembaga pelatihan, kualitas program, hingga tingginya motivasi pemuda untuk meningkatkan kompetensi. Dengan capaian ini, Sleman tidak hanya memenuhi standar IPP nasional, tetapi juga menunjukkan potensi unggul dalam mencetak pemuda yang lebih siap memasuki pasar kerja modern serta menghadapi transformasi ekonomi berbasis keterampilan.

4.1.2 Indikator Persentase Pemuda yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat atau Lebih Tinggi



Berdasarkan data estimasi BPS Kabupaten Sleman (Sakernas), diketahui bahwa indikator *Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi* memiliki bobot 0,34, batas minimum 0, batas maksimum 92,95, dan nilai estimasi indikator sebesar **88,73**. Dengan menggunakan formula transformasi linier:

Nilai Transformasi

$$= \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}} \times 100$$

$$= \frac{88,73 - 0}{92,95 - 0} \times 100 = 95,46$$

Nilai transformasi 95,46 menunjukkan bahwa capaian indikator ini berada sangat dekat dengan batas maksimum,

menandakan performa pendidikan pemuda Sleman yang sangat tinggi dalam hal pencapaian ijazah minimal SMA/ sederajat.

Tabel 4.3 Capaian dan Transformasi Indikator Pemuda yang Memiliki Ijazah SMA / Sederajat atau Lebih Tinggi Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA / sederajat atau lebih tinggi	0.34	0	92.95	88.73	95.46

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Capaian sebesar **88,73%** atau setara **9** dari **10** pemuda Sleman telah memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman berada dalam kategori **sangat baik** dalam hal pencapaian pendidikan dasar-menengah pemuda. Dengan nilai transformasi **95,46**, indikator ini berada sangat dekat dengan capaian optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses pendidikan, keberlanjutan sekolah, dan motivasi belajar di kalangan pemuda Sleman tergolong tinggi. Secara substantif, tingginya tingkat kepemilikan ijazah minimal SMA juga menjadi modal strategis bagi pengembangan kualitas tenaga kerja muda, kesiapan menghadapi dunia kerja, dan potensi peningkatan partisipasi dalam pendidikan tinggi serta pelatihan lanjutan.

4.1.3 Indikator Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK

Berdasarkan estimasi data BPS Kabupaten Sleman dari Sakernas, indikator Persentase pemuda dengan keterampilan



TIK memiliki bobot 0,33, batas minimum 0, batas maksimum 100, dan nilai indikator sebesar 100. Dengan menggunakan formula transformasi linier:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Transformasi} &= \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}} \times 100 \\ &= \frac{100 - 0}{100 - 0} \times 100 = 100\end{aligned}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa capaian indikator berada pada tingkat maksimal, yaitu seluruh target maksimum keterampilan TIK yang dirumuskan dalam kerangka indikator telah terpenuhi.

Tabel 4.4 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK Pemuda Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0.33	0	100	100	100.00

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Capaian 100% pemuda Sleman memiliki keterampilan TIK menempatkan Kabupaten Sleman dalam kategori sangat baik, bahkan ideal, dalam kesiapan digital pemudanya. Nilai transformasi 100,00 mencerminkan kondisi optimal. Ia menunjukkan bahwa hampir seluruh pemuda telah mampu mengoperasikan perangkat TIK dan memanfaatkan teknologi dalam aktivitas belajar, bekerja, dan kehidupan sehari-hari. Tingginya literasi digital ini berpotensi memperkuat daya saing tenaga kerja muda, meningkatkan peluang kewirausahaan digital, serta mendukung berbagai program transformasi digital yang dijalankan pemerintah daerah.

4.1.4 Capaian Nilai Domain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa domain Pendidikan dan Pelatihan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 merupakan salah satu komponen fundamental yang menentukan kualitas dan kapasitas dasar pemuda dalam menghadapi

dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Domain ini disusun dari tiga indikator utama, di mana masing-masing indikator memiliki bobot penilaian serta nilai transformasi tertentu yang berkontribusi langsung terhadap capaian akhir IPP.

Berikut merupakan hasil bobot dan transformasi nilai pada indikator domain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 2025.

Tabel 4.5 Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Bobot	Nilai Transformasi
Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0.33	100.00
Persentase pemuda berijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	0.34	95.46
Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0.33	100.00

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Kemudian, nilai domain dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Domain} = \sum (\text{Bobot}_i \times \text{NilaiTransformasi}_i)$$

Maka Nilai **Domain Pendidikan dan Pelatihan = 98.46**.

Adapun Kategorisasi Nilai Domain (Interval 0-100), Klasifikasi umum untuk menilai kategori adalah:

- 0 – 60 → **Rendah**
- 60 – 80 → **Sedang**
- 80 – 100 → **Tinggi**

Dengan nilai **98.46**, maka domain Pendidikan dan Pelatihan dalam Pengukuran IPP di Kabupaten Sleman termasuk dalam Kategori: **Tinggi**. Nilai ini menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kualitas pemuda yang sangat baik dalam aspek pendidikan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah ke atas, kompetensi TIK, dan partisipasi pelatihan bersertifikat berada pada tingkat yang sangat kuat. Kondisi ini mencerminkan kapasitas SDM muda Sleman yang siap bersaing dalam pasar kerja modern, mendukung ekonomi berbasis pengetahuan, serta memperkuat potensi perkembangan digital dan inovasi daerah. Domain ini menjadi salah satu pilar paling kokoh dalam konstruksi Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sleman.

4.2 DOMAIN KESEHATAN



Domain **Kesehatan** merupakan salah satu komponen fundamental dalam pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena mencerminkan kualitas hidup, kesejahteraan fisik, serta derajat kesehatan pemuda sebagai kelompok strategis pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Sleman, domain ini berperan penting untuk memastikan bahwa pemuda memiliki kondisi kesehatan yang

memungkinkan mereka berpartisipasi secara optimal dalam pendidikan, dunia kerja, serta aktivitas sosial. Secara matematis, bobot domain sebesar **0,20** menunjukkan bahwa kesehatan memberi kontribusi signifikan terhadap nilai total IPP, dengan pengukuran yang dilakukan melalui normalisasi masing-masing indikator terhadap batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan secara nasional. Proses normalisasi ini membuat kinerja setiap indikator tidak hanya dilihat dari nilai absolut, tetapi juga posisi relatifnya terhadap capaian terbaik di tingkat nasional, sehingga menghasilkan ukuran IPP yang lebih proporsional, objektif, dan dapat dibandingkan antarwilayah. Empat indikator dalam domain kesehatan – angka kesakitan, perilaku merokok, aktivitas olahraga, dan persentase remaja perempuan hamil – menggambarkan keseimbangan antara risiko kesehatan dan perilaku hidup sehat yang relevan dengan situasi pemuda di Sleman.

Tabel 4.6 Pengukuran Domain Kesehatan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min – Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Angka kesakitan pemuda	0.26	60.39 – 0	Nilai capaian dinormalisasi dengan membalik skala (karena semakin rendah angka kesakitan semakin baik), lalu dikalikan bobot indikator dan bobot domain 0.20	Indikator ini sangat sensitif terhadap kondisi kesehatan dasar pemuda. Jika Sleman memiliki angka kesakitan rendah, kontribusinya akan memperkuat nilai IPP melalui peningkatan kualitas kesehatan umum pemuda.

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Persentase pemuda yang merokok	0.23	53.18 - 3.63	Karena merokok merupakan perilaku risiko, normalisasi dilakukan dengan mengonversi nilai tinggi sebagai kondisi lebih buruk. Hasil akhir dikalikan bobot indikator dan bobot domain	Kabupaten Sleman perlu menjaga agar prevalensi merokok tetap rendah. Jika angka ini meningkat, indikator akan menurunkan nilai domain secara langsung karena mencerminkan risiko kesehatan populasi muda.
Persentase pemuda yang berolahraga	0.26	0 - 70	Dinormalisasi secara langsung karena semakin tinggi angka olahraga semakin baik. Nilai akhir merupakan hasil dari normalisasi dikalikan bobot indikator dan bobot domain	Aktivitas olahraga merupakan indikator gaya hidup sehat. Jika capaian tinggi, Sleman akan memperoleh keuntungan signifikan karena bobot indikator cukup besar dan berpotensi menaikkan nilai IPP secara substansial.
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0.25	49.01 - 0	Skala dibalik (semakin rendah semakin baik), kemudian dilakukan normalisasi dan dikalikan bobot indikator serta bobot domain	Indikator ini sangat krusial karena mencerminkan dimensi kesehatan reproduksi. Semakin rendah angka kehamilan remaja, semakin tinggi nilai IPP yang dapat dicapai Sleman melalui indikator ini.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam penjelasan ini, masing-masing indikator penopang pada domain Kesehatan akan diuraikan secara lebih mendetail, meliputi metode pengukuran, gambaran capaian terkini, serta implikasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan pemuda di Kabupaten Sleman.

4.2.1 Indikator Angka Kesakitan Pemuda



Indikator Angka Kesakitan Pemuda pada domain Kesehatan memiliki bobot **0,26**, dengan batas minimum 60,39, batas maksimum **0** (arah indikator negatif-semakin rendah semakin baik), dan nilai indikator Sleman sebesar **6,42**. Karena indikator ini merupakan *bad indicator*, maka rumus transformasi dilakukan dengan membalik arah penilaian:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Aktual}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 100$$

Substitusi nilai:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Transformasi} &= \frac{0 - 6,42}{0 - 60,39} \times 100 \\ &= \frac{-6,42}{-60,39} \times 100 = 0,1063 \times 100 = 89,3 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan nilai 6,42 yang menunjukkan tingkat kesakitan yang rendah, dimana Kabupaten Sleman memperoleh nilai transformasi **89,37**, yang mencerminkan kondisi kesehatan pemuda yang relatif baik.

Dengan angka kesakitan pemuda sebesar **6,42%**, maka secara otomatis persentase pemuda yang **tidak mengalami keluhan kesehatan** adalah:

$$100\% - 6,42\% = 93,58\%$$

Untuk melihat proporsi perbandingannya, dapat dihitung rasio antara pemuda yang sakit dibandingkan yang sehat:

$$\text{Rasio} = \frac{6,42}{93,58} \approx 1:14,6$$

Hal ini berarti bahwa : Setiap 1 pemuda yang mengalami keluhan kesehatan terdapat sekitar 15 pemuda yang berada dalam kondisi sehat.

Rasio ini menegaskan bahwa mayoritas besar pemuda Sleman berada pada kondisi kesehatan yang baik, dan angka kesakitan relatif sangat rendah. Situasi ini memperkuat

interpretasi bahwa Kabupaten Sleman memiliki kondisi kesehatan pemuda yang solid dan stabil, dengan proporsi pemuda sehat yang sangat dominan dalam komposisi populasi.

Tabel 4.7 Capaian dan Transformasi Indikator Angka Kesakitan Pemuda Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Angka Kesakitan Pemuda	0.26	60.39	0	6.42	89.37

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Nilai transformasi 89,37 menunjukkan bahwa tingkat kesakitan pemuda di Kabupaten Sleman berada pada kategori **baik**, karena semakin rendah nilai kesakitan maka semakin tinggi skor yang dihasilkan. Dengan angka kesakitan hanya **6,42 per 100 pemuda**, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pemuda Sleman berada dalam kondisi kesehatan umum yang cukup baik dan relatif minim mengalami gangguan kesehatan yang signifikan. Meskipun demikian, nilai ini masih membuka ruang untuk intervensi promotif-preventif, terutama dalam upaya mempertahankan gaya hidup sehat dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan pemuda agar capaian kesehatan dapat terus stabil dan bahkan meningkat di tahun-tahun mendatang.

4.2.2 Indikator Persentase Pemuda yang Merokok



Indikator Persentase pemuda yang merokok termasuk dalam domain Kesehatan dengan bobot **0,23**, batas minimum **53,18**, batas maksimum **3,63** (indikator negatif-semakin rendah semakin baik), dan capaian Sleman sebesar **25,8%**. Karena merupakan *bad indicator*, maka nilai transformasi dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Aktual}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 100$$

$$= \frac{3.63 - 25.8}{3.63 - 53.18} \times 100$$

$$= \frac{-22.17}{-49.55} \times 100 = 0.447 \times 100 = 55.26$$

Dengan demikian, nilai transformasi indikator ini adalah **55,26**, yang menunjukkan bahwa perilaku merokok pemuda di Sleman masih berada pada tingkat **sedang-mengkhawatirkan** jika dibandingkan dengan batas maksimum performa (prevalensi merokok yang sangat rendah).

Tabel 4.8 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Merokok Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda yang merokok	0.23	53.18	3.63	25.8	55.26

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Dengan prevalensi merokok **25,8%**, maka proporsi pemuda yang **tidak merokok** adalah:

$$100\% - 25,8\% = 74,2\%$$

Rasio pemuda merokok dibandingkan pemuda tidak merokok:

$$\frac{25.8}{74.2} \approx 1:2.88$$

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap 1 pemuda yang merokok terdapat sekitar 3 pemuda yang tidak merokok. Rasio ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pemuda tidak merokok, angka 25,8% masih cukup signifikan dan menunjukkan tantangan kesehatan perilaku yang perlu diperhatikan.

Selanjutnya nilai transformasi sebesar **55,26** menunjukkan bahwa indikator ini berada dalam kategori **sedang**, mendekati batas bawah. Prevalensi merokok sebesar **25,8%** menggambarkan bahwa satu dari empat pemuda di Sleman masih memiliki kebiasaan merokok, yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit tidak menular sejak usia muda. Meskipun rasio menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang tidak merokok hampir tiga kali lipat lebih besar, namun angka perokok tetap cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian melalui kampanye kesehatan, promosi gaya hidup sehat, serta

penguatan regulasi kawasan tanpa rokok untuk menekan angka perilaku merokok di kalangan pemuda ke depan.

4.2.3 Indikator Persentase Pemuda yang Berolahraga



Indikator persentase pemuda yang berolahraga memiliki bobot **0,26**, batas minimum **0**, batas maksimum **70**, dan nilai indikator berdasarkan hasil kuesioner online sebesar **65,8%**. Karena indikator ini merupakan *Good indicator* yang berarti semakin tinggi angkanya semakin baik. Rumus transformasi yang digunakan adalah:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}} \times 100$$

Substitusi nilai:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{65.8 - 0}{70 - 0} \times 100 = 94.00$$

Nilai transformasi **94,00** menunjukkan bahwa tingkat aktivitas olahraga pemuda di Kabupaten Sleman berada pada kondisi yang **sangat baik** dan mendekati capaian maksimal untuk indikator ini.

Tabel 4.9 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Berolahraga Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda yang berolahraga	0.26	0	70	65.8	94.00

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Pemuda Kabupaten Sleman

Rasio Pemuda yang Berolahraga terhadap yang Tidak Berolahraga. Dengan 65,8% pemuda berolahraga, maka:

$$\text{Pemuda yang tidak berolahraga} = 100\% - 65.8\% = 34.2\%$$

Rasio:

$$\frac{65.8}{34.2} \approx 1:0.52$$

Artinya, untuk setiap 2 pemuda yang berolahraga, hanya ada sekitar 1 pemuda yang tidak berolahraga. Rasio ini menunjukkan tingkat partisipasi olahraga yang tinggi di kalangan pemuda Sleman.

Nilai transformasi **94,00** menempatkan indikator aktivitas olahraga pemuda dalam kategori **tinggi**, bahkan sangat dekat dengan performa ideal. Dengan **65,8%** pemuda melakukan aktivitas olahraga sedikitnya sekali dalam seminggu terakhir, Kabupaten Sleman menunjukkan kondisi perilaku kesehatan yang sangat positif.

Tingginya partisipasi olahraga ini mengindikasikan beberapa hal penting terkait Kesadaran pemuda terhadap kesehatan fisik semakin meningkat, baik untuk kebugaran maupun pencegahan penyakit, Akses terhadap fasilitas olahraga di Sleman relatif baik, mulai dari ruang publik, pusat kebugaran, hingga komunitas olahraga yang aktif maupun Lingkungan sosial mendukung gaya hidup aktif, termasuk tren olahraga yang semakin populer di kalangan pemuda.

Namun demikian, masih terdapat **34,2% pemuda yang belum aktif berolahraga**. Kelompok ini berpotensi terdiri dari pemuda yang bekerja penuh waktu, pemuda di wilayah pinggiran, atau mereka yang memiliki keterbatasan fasilitas dan waktu. Oleh karena itu, intervensi tambahan, seperti penyediaan ruang terbuka yang lebih merata, edukasi olahraga murah/mandiri, dan kampanye gaya hidup aktif, tetap diperlukan untuk mendorong peningkatan lebih lanjut.

4.2.4 Indikator Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil



Indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil merupakan indikator sensitif dan termasuk *bad indicator* karena semakin tinggi angkanya, semakin buruk kondisi kesehatan reproduksi dan kerentanan remaja. Indikator ini memiliki bobot **0,25**, batas minimum **49,01**, batas maksimum **0**. Nilai Persentase remaja perempuan usia 15-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah/pernah kawin berdasarkan data Dinkes Kabupaten Sleman yang diberikan.

Berikut merupakan perhitungan persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sleman pada tahun 2024:

Tabel 4.10 Jumlah Persalinan Remaja Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
Usia 15-17 th	43
Usia 18 th	44
Total persalinan 15-18 th	87

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sleman

Adapun jumlah remaja Kabupaten Sleman yang telah / pernah menikah pada tahun 2024 adalah sebanyak 261 jiwa.

Maka dari itu, perhitungan persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sleman pada Tahun 2024 adalah sebesar:

$$\% = \frac{\text{Total persalinan 15-18 th}}{\sum \text{remaja perempuan usia 15-18 th yang telah/pernah kawin}} \times 100$$

$$\% = \frac{87}{261} \times 100 \approx 33.33\%$$

Perhitungan persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sleman pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Jumlah Persalinan Remaja Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Usia 15-17 th	41

Keterangan	Jumlah
Usia 18 th	23
Total persalinan 15-18 th	64

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sleman

Adapun jumlah remaja Kabupaten Sleman yang telah / pernah menikah pada tahun 2025 adalah sebanyak 177 jiwa.

Maka dari itu, perhitungan persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sleman pada Tahun 2025 adalah sebesar:

$$\text{Persentase} = \frac{64}{177} \times 100 \approx 36.16\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran indikator terkait kehamilan pada remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah atau pernah menikah, diperoleh interpretasi awal sebagai berikut:

- **Tahun 2024:** Diperkirakan bahwa terdapat sekitar 33 persen remaja Perempuan yang sedang hamil. Hal ini berarti bahwa dengan kata lain, dari setiap 100 remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah atau pernah menikah, sekitar 33 orang diestimasikan mengalami kehamilan. Angka ini menunjukkan bahwa risiko kehamilan pada kelompok yang menikah dini masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian kebijakan.
- **Tahun 2025:** Proporsi pada indikator ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 36 persen. Artinya, dari setiap 100 remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah atau pernah menikah, sekitar 36 orang diketahui mengalami kehamilan. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran yang perlu dicermati, baik dari aspek kesehatan reproduksi, akses layanan, maupun efektivitas program pencegahan perkawinan usia anak.

Meskipun terjadi sedikit peningkatan dari 2024 ke 2025, angka ini tetap menunjukkan fenomena kehamilan remaja yang signifikan dan perlu menjadi fokus intervensi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan remaja.

Berdasarkan kombinasi data 2024-2025, sekitar 34-35% remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah/pernah kawin mengalami kehamilan di Kabupaten Sleman.

$$\text{Persentase Gabungan} = \frac{\text{Total persalinan gabungan}}{\text{Total KTD gabungan}} \times 100$$

$$\text{Persentase Gabungan} = \frac{151}{438} \times 100 \approx 34.47\%$$

Dengan demikian, maka nilai transformasinya adalah:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Aktual}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 100$$

Dimana diketahui

- Nilai Maksimum = 0
- Nilai Minimum = 49,01
- Nilai Aktual = 34,47

Dalam pengukuran ini, indikator memiliki **batas minimum 49,01** (nilai terburuk) dan **batas maksimum 0** (nilai terbaik), dengan capaian Kabupaten Sleman berada pada angka 34,47% jika dihitung dari total remaja perempuan 15-18 tahun yang telah/pernah kawin dan mengalami kehamilan.

Meskipun persentase kehamilan remaja gabungan masih relatif tinggi secara absolut (34,47%), dalam skala transformasi IPP, Kabupaten Sleman telah berada pada capaian menengah dalam konteks pembobotan indikator Kesehatan. Nilai ini mencerminkan perlunya perhatian berkelanjutan. Namun dari sisi pengukuran IPP, transformasinya lebih realistis dibanding perhitungan sebelumnya yang hanya mengacu pada data 2024.

4.2.5 Capaian Nilai Domain Kesehatan Kabupaten Sleman 2025

Dengan mempertimbangkan hasil pengukuran pada seluruh indikator yang termasuk dalam aspek kesehatan pemuda, dapat dirumuskan bahwa **domain kesehatan** dalam IPP Kabupaten Sleman 2025 mencakup empat indikator utama. Keempat indikator tersebut memiliki bobot kontribusi dan nilai transformasi masing-masing yang secara bersama-sama membentuk gambaran menyeluruh mengenai derajat kesehatan fisik, reproduktif, serta perilaku berisiko pada kelompok pemuda.

Berikut merupakan hasil bobot dan transformasi nilai pada indikator domain kesehatan Kabupaten Sleman 2025.

Tabel 4.12 Bobot dan Nilai Transformasi Indikator Domain Kesehatan

Indikator	Bobot	Nilai Transformasi
Angka kesakitan pemuda	0.26	89.37
Persentase pemuda yang merokok	0.23	55.26
Persentase pemuda yang berolahraga	0.26	94.00
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0.25	29.67

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Kemudian, nilai domain dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Domain} = \sum (\text{Bobot}_i \times \text{NilaiTransformasi}_i)$$

Maka Nilai **domain Kesehatan** = **67.80**. Adapun Kategorisasi Nilai domain (Interval 0-100), Klasifikasi umum untuk menilai kategori adalah:

- 0 - 60 → **Rendah**
- 60 - 80 → **Sedang**
- 80 - 100 → **Tinggi**

Dengan nilai **67.80**, maka domain kesehatan dalam pengukuran IPP Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori **Sedang**. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pemuda di Kabupaten Sleman relatif moderat dengan capaian yang beragam antarindikator. Indikator angka kesakitan dan aktivitas olahraga yang menunjukkan capaian tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar pemuda berada dalam kondisi fisik yang baik serta memiliki kebiasaan hidup sehat. Ini yang perlu terus diperkuat. Demikian pula tingginya keterlibatan pemuda dalam olahraga menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas kesehatan jangka panjang.

Namun demikian, dua indikator lain, yaitu persentase pemuda yang merokok dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil, menjadi faktor yang menurunkan nilai domain. Prevalensi merokok yang masih cukup tinggi mencerminkan tantangan serius dalam perilaku risiko kesehatan pemuda. Sementara itu, nilai transformasi yang rendah pada indikator kehamilan remaja menunjukkan adanya kerentanan pada kesehatan reproduksi, kebutuhan akses layanan ramah remaja, serta perlunya edukasi kesehatan reproduksi yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, domain Kesehatan menjadi aspek penting dalam struktur Indeks Pembangunan Pemuda karena kesehatan merupakan fondasi bagi keberlanjutan pendidikan, produktivitas kerja, dan partisipasi sosial. Capaian kategori “sedang” ini menegaskan perlunya penguatan intervensi promotif-preventif dan pendekatan lintas sektor untuk memperbaiki perilaku kesehatan serta melindungi remaja dari risiko kesehatan jangka panjang. Dengan peningkatan fokus pada dua indikator risiko utama, Sleman memiliki peluang besar untuk mendorong domain Kesehatan menuju kategori tinggi di masa mendatang.

4.3 DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK



Domain	Ketenagakerjaan	Layak
memegang peranan	krusial	dalam
pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemuda memasuki pasar kerja, memperoleh pekerjaan yang produktif, dan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Sleman, dinamika ketenagakerjaan pemuda sangat dipengaruhi oleh karakter wilayah sebagai pusat pendidikan tinggi, pusat layanan, dan kawasan ekonomi yang berkembang. Secara matematis, bobot domain sebesar 0,20 menegaskan bahwa kualitas pekerjaan pemuda memiliki		

kontribusi signifikan terhadap nilai IPP, sementara proses pengukurannya dilakukan melalui normalisasi capaian tiap indikator terhadap batas minimum dan maksimum nasional. Dengan demikian, nilai yang diperoleh Sleman tidak hanya mencerminkan capaian absolut, tetapi juga posisi relatifnya dibandingkan standar tertinggi yang dapat dicapai. Indikator dalam domain ini memberikan gambaran menyeluruh terkait tingkat kerentanan pemuda dalam pasar kerja melalui ukuran NEET (*Not in Employment, Education, or Training*), ukuran pekerjaan tidak penuh, serta potensi kewirausahaan pemuda sebagai salah satu pilar kesempatan ekonomi modern.

Tabel 4.13 Pengukuran Domain Ketenagakerjaan Layak serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Persentase pemuda NEET	0.35	53 - 10	Nilai capaian dinormalisasi dengan pembalikan skala (semakin rendah semakin baik), kemudian dikalikan bobot indikator dan bobot domain 0.20	NEET merupakan indikator yang paling menentukan dalam domain ini karena bobotnya paling besar. Jika angka NEET di Sleman rendah, nilai IPP akan meningkat signifikan karena menunjukkan bahwa pemuda aktif di pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan.
Persentase pemuda pekerja tidak penuh (underemployment)	0.32	76 - 20	Karena indikator ini menggambarkan ketidaklayakan kerja, skala dibalik sebelum dinormalisasi. Nilai akhir dihitung setelah dikalikan bobot indikator dan bobot domain	Tingginya pekerja tidak penuh menunjukkan kerentanan struktural pasar kerja pemuda. Jika Sleman mampu menekan angka ini, kontribusinya terhadap IPP meningkat karena menunjukkan peningkatan kualitas kesempatan kerja.
Rasio kewirausahaan pemuda	0.33	0 - 2.5	Dinormalisasi secara langsung karena semakin tinggi angka kewirausahaan dianggap semakin baik. Nilai kemudian dikalikan bobot indikator dan bobot domain	Rasio kewirausahaan mencerminkan dinamika inovasi ekonomi pemuda. Sleman berpotensi unggul jika kegiatan startup, UMKM kreatif, dan ekosistem usaha pemuda berkembang, sehingga indikator ini dapat menjadi penggerak positif IPP.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam uraian ini, masing-masing indikator penopang pada domain Ketenagakerjaan Layak akan dijelaskan lebih rinci, termasuk metodologi pengukuran, perkembangan capaian, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kualitas kesempatan kerja pemuda di Kabupaten Sleman.

4.3.1 Indikator Persentase Pemuda NEET



Indikator *Persentase Pemuda NEET* (Not in Employment, Education, or Training) merupakan **indikator negatif**, karena semakin tinggi angkanya, semakin buruk kondisi ketenagakerjaan pemuda. Indikator ini memiliki:

1. Bobot: 0.35
2. Batas Minimum (*worst*): 53
3. Batas Maksimum (*best*): 10
4. Nilai aktual Sleman: **6,48**

Pada indikator ini, nilai **6,48%** berarti hanya 9 dari 100 pemuda di Sleman yang berada dalam kondisi NEET. Karena indikator NEET adalah *bad indicator*, rumus transformasinya adalah:

$$\text{Nilai Transformasi} = \left(-100 * \frac{\text{Maks} - \text{Aktual}}{\text{Maks} - \text{Min}} \right) + 100$$

Namun terdapat kondisi khusus dimana Nilai aktual Sleman pada dasarnya (**6,48%**) lebih baik daripada nilai maksimum (10%). Dalam metodologi IPP, jika nilai indikator **melampaui batas terbaik (lebih baik dari *best value*)**, maka: Nilai transformasi langsung ditetapkan = 100 (capaian optimal). Hal ini dikarenakan performa aktual lebih baik daripada performa "nilai terbaik" yang ditetapkan dalam batas indikator.

Tabel 4.14 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda NEET Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda NEET	0.35	53	10	10	100.00

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Rasio Pemuda NEET terhadap Pemuda Non-NEET, maka dengan nilai NEET sebesar **9%**, maka:

$$100\% - 9\% = 91\%$$

Sehingga rasionya:

$$\frac{9}{91} \approx 1:10.11$$

Setiap 1 pemuda NEET terdapat sekitar 10 pemuda lain yang bekerja, sekolah, atau mengikuti pelatihan. Rasio ini menunjukkan bahwa mayoritas besar pemuda Sleman berada dalam aktivitas produktif.

Berkaitan dengan pemenuhan terhadap aspek ini, nilai transformasi 100 menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman berada dalam kondisi **sangat baik dan optimal** dalam mengurangi jumlah pemuda NEET. Capaian 6,48% menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda memiliki akses atau keterlibatan dalam pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan. Angka ini lebih baik daripada batas terbaik indikator (10%), sehingga menempatkan Sleman sebagai wilayah dengan tingkat eksklusi sosial-ekonomi pemuda yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, serta peluang pelatihan yang tersedia bagi pemuda. Meskipun demikian, kelompok 6,48% yang masih NEET tetap perlu diperhatikan melalui intervensi lanjutan agar tidak terjebak dalam siklus ketidakaktifan yang berdampak pada kesejahteraan jangka panjang.

4.3.2 Indikator Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh



Indikator *Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh* mengukur proporsi pemuda yang jam kerjanya tidak mencapai standar kerja penuh, baik karena sifat pekerjaan yang tidak tetap, jam kerja yang kurang dari standar, atau ketidaksesuaian antara kemauan bekerja dan jam kerja aktual. Dengan nilai indikator **76%**, kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda yang bekerja di Kabupaten Sleman belum memperoleh jam kerja yang stabil atau memadai. Angka ini jauh lebih tinggi daripada standar minimum indikator (20%), serta melebihi batas maksimum pembanding (23,99%), yang berarti beban kerja tidak penuh di Sleman berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Rasio pekerja tidak penuh menunjukkan proporsi mereka yang tidak bekerja penuh dibandingkan keseluruhan pekerja pemuda. Dengan nilai indikator 76%, rasio dapat dinyatakan sebagai:

$$\text{Rasio} = \frac{76}{100} = 0,76$$

Artinya, **3 dari 4 pemuda bekerja tidak penuh**. Rasio 0,76 ini menegaskan bahwa kerentanan kerja di Sleman berada pada titik yang tinggi, dengan sebagian besar pemuda belum memperoleh pekerjaan yang layak dari sisi jam kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan stabilitas pendapatan serta membatasi peningkatan kualitas hidup pemuda.

Tabel 4.15 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda pekerja tidak penuh	0.32	76	20	23.99	92,88

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Capaian indikator *Persentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh* di Kabupaten Sleman menunjukkan kondisi yang sangat baik dengan nilai aktual sebesar **23,99%**, jauh lebih rendah dibandingkan batas minimum yang ditetapkan (76%) dan mendekati batas maksimum (20%) sebagai kondisi ideal. Rendahnya proporsi pemuda yang bekerja tidak penuh ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemuda di Sleman telah terserap dalam pasar kerja dengan kualitas pekerjaan yang relatif memadai, baik dari sisi jam kerja maupun stabilitas pekerjaan.

Nilai transformasi indikator yang mencapai **92,88** memperkuat gambaran bahwa kinerja pembangunan kepemudaan, terutama pada aspek ketenagakerjaan, berada pada kategori **sangat baik**.

Dengan rasio pemuda pekerja tidak penuh sebesar **0,2399**, atau sekitar **24 dari setiap 100 pemuda pekerja**, pemerintah daerah perlu tetap melakukan upaya preventif dan penguatan kebijakan agar kelompok pemuda yang masih bekerja tidak penuh dapat ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya.

4.3.3 Indikator Rasio Kewirausahaan Pemuda



Rasio kewirausahaan pemuda mengukur proporsi pemuda yang berperan sebagai wirausahawan dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja pemuda. Dengan nilai indikator 1,75%, Kabupaten Sleman menunjukkan tingkat partisipasi wirausaha pemuda yang cukup baik jika dibandingkan batas maksimum 2,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemuda Sleman mulai menunjukkan orientasi pada usaha mandiri, inovasi ekonomi, serta keberanian mengambil risiko, meskipun basis kewirausahaan masih perlu terus diperkuat. Nilai transformasi 70 menandakan bahwa tingkat kewirausahaan berada pada kategori sedang menuju tinggi, mendekati capaian optimal pada skala regional/nasional.

Rasio kewirausahaan memberikan gambaran perbandingan antara pemuda yang berwirausaha dan yang tidak berwirausaha dalam total angkatan kerja pemuda. Dengan nilai 1,75%, perbandingan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai:

$$\text{Rasio} = \frac{1.75}{100} \approx 0.0175$$

Dalam bentuk yang lebih komunikatif, **setiap 1 pemuda wirausahawan terdapat sekitar 57 pemuda lainnya yang bukan wirausahawan.**

Rasio ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wirausahawan masih relatif kecil, keberadaannya menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi lokal, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan inovasi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi pemuda.

Tabel 4.16 Capaian dan Transformasi Indikator Rasio Kewirausahaan Pemuda Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Rasio kewirausahaan pemuda	0.33	0	2.50	1.75	70.00

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Dengan menggunakan batas minimum 0 dan batas maksimum 2,5, nilai indikator 1,75 menghasilkan nilai transformasi:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{1.75 - 0}{2.5 - 0} \times 100 = 70$$

Nilai transformasi 70 menunjukkan bahwa posisi Sleman berada di kategori menengah-atas. Capaian indikator ini mencerminkan potensi kewirausahaan pemuda yang cukup kuat dan berada di atas rata-rata. Meski demikian, ruang perbaikan masih terbuka lebar, khususnya terkait ekosistem pendukung usaha pemuda seperti akses pendanaan, pendampingan berkelanjutan, serta afirmasi kebijakan berbasis inovasi dan teknologi.

Sebagai tambahan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman memberikan data baru terkait rasio kewirausahaan berbasis UMKM yang dibantu buruh pemuda dengan penyesuaian definisi indikator mengikuti ketersediaan variabel. Data ini menunjukkan bahwa:

1. Pelaku UMKM dibantu buruh usia 15-34 terhadap jumlah pemuda bekerja selama 1 minggu terakhir (sebagai pengganti angkatan kerja 15-34) mencapai 1,2%;
2. Pelaku UMKM dibantu buruh usia 16-35 terhadap jumlah pemuda bekerja selama 1 minggu terakhir mencapai 1,36%;
3. Pelaku UMKM dibantu buruh usia 15-30 terhadap jumlah pemuda bekerja selama 1 minggu terakhir mencapai 0,94%.

Dengan penyesuaian definisi ini, indikator rasio kewirausahaan tetap relevan sebagai alat ukur untuk memantau keterlibatan pemuda dalam usaha mandiri sambil menyesuaikan dengan ketersediaan data BPS terkait jumlah pemuda yang bekerja selama periode tertentu. Data ini memberikan perspektif tambahan bagi pengembangan program peningkatan kewirausahaan pemuda yang lebih tepat sasaran.

4.3.4 Capaian Nilai Domain Ketenagakerjaan Layak Kabupaten Sleman 2025

Domain **Ketenagakerjaan Layak** mencakup tiga indikator utama yang masing-masing memiliki bobot penilaian serta nilai transformasi tersendiri. Ketiga indikator tersebut

menjadi elemen penting dalam mengukur kualitas kesempatan kerja yang tersedia bagi pemuda.

Berikut merupakan hasil bobot dan transformasi nilai pada indikator domain Ketenagakerjaan Layak Kabupaten Sleman 2025.

Tabel 4.17 Bobot dan Nilai Transformasi Indikator Domain Ketenagakerjaan Layak

Indikator	Bobot	Nilai Transformasi
Persentase pemuda NEET	0.35	100.00
Persentase pemuda pekerja tidak penuh	0.32	92.88
Rasio kewirausahaan pemuda	0.33	70.00

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Nilai domain dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai domain} = \sum (\text{Bobot}_i \times \text{Nilai Transformasi}_i)$$

Substitusi nilai indikator:

Nilai Domain Ketenagakerjaan Layak

$$= (0.35 \times 100.00) + (0.32 \times 92.88) + (0.33 \times 70.00)$$

$$\text{Nilai Domain Ketenagakerjaan Layak} = 35.00 + 29.72 + 23.10 = 87.82$$

Kategorisasi nilai domain (Interval 0-100), klasifikasi umum untuk menilai kategori adalah:

- 0 - 60 → **Rendah**
- 60 - 80 → **Sedang**
- 80 - 100 → **Tinggi**

Dengan nilai 87.82, maka domain Ketenagakerjaan Layak dalam pengukuran IPP di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori "**tinggi**". Nilai domain sebesar 87.82 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kualitas ketenagakerjaan pemuda yang baik. Angka pemuda NEET yang rendah menandakan mayoritas pemuda telah terlibat dalam pendidikan atau pekerjaan, sementara angka pekerja tidak penuh yang cukup terkendali menunjukkan adanya peluang kerja layak yang memadai. Rasio kewirausahaan pemuda sebesar 70 menandakan potensi wirausaha cukup berkembang sebagai alternatif lapangan kerja dan sumber inovasi ekonomi. Secara keseluruhan, domain ini mencerminkan bahwa pemuda Sleman memiliki akses yang baik terhadap pekerjaan layak, peluang kewirausahaan, dan keterlibatan ekonomi yang produktif, sehingga mendukung pembangunan ekonomi berbasis generasi muda yang berdaya saing.

4.4 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN



Domain **Partisipasi dan Kepemimpinan** merupakan elemen inti dalam pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena mencerminkan kapasitas pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan sosial, pengambilan keputusan, serta keterlibatan aktif dalam organisasi dan ruang publik. Bagi Kabupaten Sleman, domain ini sangat penting mengingat karakter pemudanya yang dinamis, heterogen, serta berpotensi besar dalam menggerakkan komunitas, organisasi kepemudaan, dan aktivitas sosial di tingkat lokal. Secara matematis, bobot domain sebesar **0,20** menunjukkan bahwa kualitas partisipasi dan kepemimpinan pemuda berperan signifikan terhadap nilai akhir IPP. Penghitungan dilakukan melalui normalisasi terhadap batas minimum-maksimum tiap indikator sehingga capaian Sleman diukur secara objektif dan dapat dibandingkan secara nasional. Ketiga indikator dalam domain ini menggambarkan spektrum lengkap partisipasi pemuda mulai dari keterlibatan sosial masyarakat, keaktifan dalam organisasi, hingga kemampuan mencapai posisi kepemimpinan formal dalam struktur manajerial.

Tabel 4.18 Pengukuran Domain Partisipasi dan Kepemimpinan serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	0.34	0 - 100	Dinormalisasi secara langsung berdasarkan capaian terhadap rentang nilai penuh, kemudian dikalikan bobot indikator dan bobot domain 0.20	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi sosial pemuda. Semakin tinggi keterlibatan mereka, semakin kuat kontribusi terhadap peningkatan IPP karena menunjukkan kepedulian dan peran aktif dalam komunitas.
Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0.33	0 - 18.5	Nilai capaian dinormalisasi terhadap batas nasional sehingga terlihat posisi Sleman dalam hal budaya	Keaktifan pemuda dalam organisasi menjadi penanda kuat kemampuan mereka berinteraksi, berkolaborasi, serta mengembangkan jejaring. Jika angka partisipasi organisasi tinggi, kontribusinya terhadap IPP

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
			organisasi kepemudaan	cukup signifikan karena bobot indikator besar.
Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0.33	0 - 4	Dinormalisasi secara langsung dan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kualitas kepemimpinan pemuda	Indikator ini berkaitan langsung dengan kemampuan pemuda mencapai posisi pengambil keputusan. Jika capaian Sleman meningkat, hal ini akan memberikan peningkatan IPP yang cukup kuat karena menunjukkan kemampuan pemuda dalam memimpin institusi dan organisasi.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam analisis ini, masing-masing indikator penopang pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan akan diuraikan lebih mendalam, mencakup metodologi pengukuran, nilai capaian indikator di Kabupaten Sleman, serta arah kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat partisipasi dan kemampuan kepemimpinan pemuda.

4.4.1 Indikator Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas (Sosial Kemasyarakatan)



Indikator Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan gotong royong, kegiatan kepemudaan, bakti sosial, dan program kemasyarakatan lainnya. Dengan nilai 81,4%, mayoritas pemuda Sleman aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan

tingkat kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial, keterlibatan komunitas, dan pembelajaran nilai-nilai kolektif serta kepemimpinan.

Rasio pemuda yang mengikuti kegiatan sosmas dibandingkan yang tidak mengikuti dapat dihitung sebagai berikut:

$$100\% - 81,4\% = 18,6\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{81,4}{18,6} \approx 4,37:1$$

Hal ini mencerminkan bahwa pada setiap 1 pemuda yang tidak mengikuti kegiatan sosial terdapat sekitar 4 s/d 5 pemuda yang aktif berpartisipasi. Rasio ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda Sleman memiliki keterlibatan sosial yang tinggi. Ini dapat menjadi modal sosial penting dalam pengembangan kapasitas kepemudaan dan ketahanan komunitas.

Tabel 4.19 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Mengikuti Kegiatan Sosmas Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	0.34	0	100	81.4	81.40

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Pemuda Kabupaten Sleman

Dengan batas minimum 0 dan batas maksimum 100, nilai indikator 81,4, menghasilkan nilai transformasi 81,40, menempatkan Kabupaten Sleman pada kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial telah mencapai capaian yang sangat baik, mendekati nilai optimal. Keterlibatan ini berpotensi mendukung penguatan jaringan sosial, kepemimpinan kolektif, serta pengembangan program-program kepemudaan yang produktif.

4.4.2 Indikator Persentase Pemuda Aktif Mengikuti

Organisasi

Indikator ini mengukur proporsi pemuda yang aktif terlibat dalam organisasi formal atau semi-formal, seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kelompok sosial, atau organisasi berbasis komunitas. Hasil survey/kuesioner pada

dasarnya menunjukkan bahwa proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya adalah



74,6%. Namun, batasan tertinggi yang ditetapkan Kemenpora dalam penghitungan IPP adalah 18,5% sebagai nilai tertinggi.

Dengan nilai indikator 18,5%, Sleman mencapai batas maksimum indikator, yang menandakan partisipasi pemuda dalam organisasi sudah optimal. Kondisi ini memperlihatkan pemuda Sleman memiliki keterlibatan struktural yang kuat dalam jaringan organisasi, yang mendukung pengembangan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengalaman pengambilan keputusan.

Rasio pemuda yang aktif mengikuti organisasi dibandingkan yang tidak aktif:

$$100\% - 18.5\% = 81.5\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{18.5}{81.5} \approx 1:4.4$$

Setiap 1 pemuda yang aktif dalam organisasi terdapat sekitar 4-5 pemuda yang tidak aktif. Meskipun rasio menunjukkan sebagian besar pemuda belum tergabung dalam organisasi, capaian indikator berada pada nilai maksimal, karena batas indikator ditetapkan 18,5% berdasarkan standar pengukuran domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Hal ini menunjukkan pemuda yang aktif dalam organisasi telah memanfaatkan peluang partisipasi secara maksimal sesuai ukuran domain.

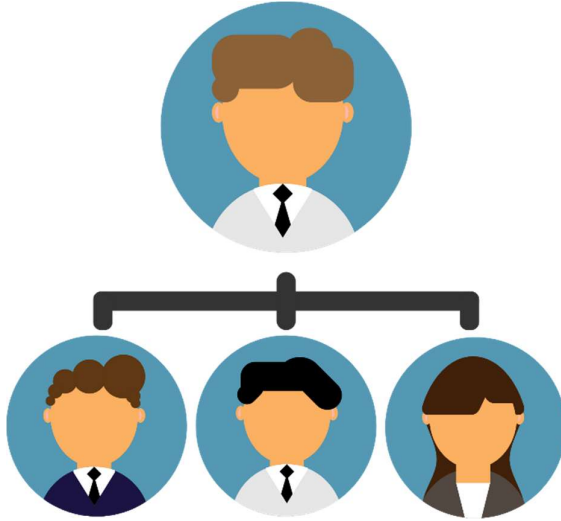
Tabel 4.20 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Aktif Mengikuti Organisasi Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0.33	0	18.5	18.5	100.00

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Pemuda Kabupaten Sleman

Dengan batas minimum 0 dan maksimum 18,5, nilai indikator 18,5 menghasilkan nilai transformasi 100, menempatkan Sleman pada kategori optimal untuk indikator ini. Kondisi ini menegaskan bahwa, dalam kerangka domain Partisipasi dan Kepemimpinan, pemuda Sleman telah mencapai performa tertinggi dalam hal keterlibatan formal-organisasi.

4.4.3 Indikator Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial



Indikator ini mengukur proporsi pemuda yang memiliki posisi manajerial atau jabatan kepemimpinan formal di organisasi, perusahaan, atau lembaga. Dengan nilai 1,59%, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sekitar 1-2 dari 100 pemuda berada dalam posisi manajerial. Angka ini relatif rendah jika dibandingkan dengan batas maksimum indikator 4%, menandakan bahwa peluang pemuda untuk menduduki posisi strategis masih terbatas. Kondisi ini dapat menjadi indikator perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan, pelatihan manajerial, serta kesempatan bagi pemuda untuk mengambil peran strategis dalam organisasi maupun sektor formal.

Rasio pemuda yang menduduki posisi manajerial dibandingkan yang tidak menduduki posisi tersebut adalah:

$$100\% - 1.59\% = 98.41\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{1.59}{98.41} \approx 1:62$$

Rasio ini menunjukkan bahwa dari setiap **1 pemuda yang menduduki posisi manajerial terdapat sekitar 62 pemuda lain yang belum memiliki posisi strategis**. Rasio ini menunjukkan dominasi pemuda non-manajerial dalam populasi dan menegaskan adanya keterbatasan akses pemuda terhadap posisi kepemimpinan formal. Meski begitu, indikator ini tetap menjadi basis evaluasi penting untuk pengembangan kapasitas kepemudaan.

Tabel 4.21 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda yang menduduki	0.33	0	4	1.59	39.75

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
posisi manajerial					

Sumber: Hasil Olahan Estimasi BPS Kabupaten Sleman 2025 & Identifikasi Tim Penulis

Dengan batas minimum 0 dan maksimum 4, **nilai indikator 1,59** menghasilkan nilai transformasi 39,75, yang menempatkan Sleman pada **kategori sedang-rendah**. Hal ini menandakan bahwa partisipasi pemuda dalam posisi manajerial masih memerlukan peningkatan signifikan, baik melalui program pelatihan kepemimpinan, *mentoring*, maupun peluang advokasi pemuda di organisasi formal maupun sektor pemerintahan.

4.4.4 Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sleman 2025

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan mencakup tiga indikator utama, masing-masing memiliki bobot dan nilai transformasi tersendiri. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana partisipasi aktif dan kapasitas kepemimpinan telah berkembang, sekaligus menentukan kontribusi relatif tiap indikator dalam penilaian keseluruhan.

Berikut merupakan hasil bobot dan transformasi nilai pada indikator domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sleman 2025.

Tabel 4.22 Bobot dan Nilai Tranformasi Indikator Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Indikator	Bobot	Nilai Transformasi
Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	0.34	81.40
Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0.33	100.00
Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0.33	39.75

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai domain yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai Domain} = \sum (\text{Bobot})_i \times (\text{Nilai Transformasi})_i$$

Dengan melakukan substitusi terhadap nilai masing-masing indikator, diperoleh:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai domain Partisipasi dan Kepemimpinan} \\ &= (0.34 \times 81.40) + (0.33 \times 100.00) + (0.33 \times 39.75) \\ &= 28.08 + 33.00 + 13.12 = \mathbf{73.79} \end{aligned}$$

Kategorisasi nilai domain (rentang 0-100) adalah sebagai berikut:

- 0 - 60 → **Rendah**
- 60 - 80 → **Sedang**
- 80 - 100 → **Tinggi**

Berdasarkan hasil tersebut, nilai 73,79 menempatkan **domain Partisipasi dan Kepemimpinan** dalam pengukuran IPP Kabupaten Sleman pada kategori **Sedang**. Nilai domain sebesar 73,79 menggambarkan bahwa pemuda Sleman memiliki tingkat partisipasi dan kapasitas kepemimpinan yang berada pada level moderat. Tingkat keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun keikutsertaan dalam organisasi formal yang relatif baik menunjukkan adanya minat, kesadaran kolektif, dan kemauan pemuda untuk berkontribusi dalam aktivitas masyarakat.

Namun demikian, proporsi pemuda yang menempati posisi manajerial atau peran strategis dalam organisasi masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang untuk pengembangan kepemimpinan formal, kemampuan pengambilan keputusan, dan peran strategis lainnya masih perlu diperluas.

Secara keseluruhan, domain ini mencerminkan bahwa pemuda Sleman memiliki potensi dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif, tetapi tetap memerlukan penguatan melalui program pengembangan kepemimpinan, pendampingan (mentoring), serta perluasan akses terhadap posisi struktural agar keterlibatan pemuda dalam peran strategis dapat meningkat secara signifikan.

4.5 DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER



Domain **Inklusivitas dan Kesetaraan Gender** merupakan salah satu pilar penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena menggambarkan sejauh mana pemuda - tanpa membedakan gender maupun kondisi disabilitas - memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Di Kabupaten Sleman, domain ini memiliki makna strategis mengingat dinamika

pemuda yang beragam serta kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok pemuda dapat berpartisipasi dan berkembang secara adil. Bobot domain sebesar **0,19** menunjukkan bahwa aspek inklusivitas memiliki kontribusi besar dalam menentukan kualitas pembangunan pemuda secara keseluruhan. Secara matematis, nilai masing-masing indikator dinormalisasi terhadap batas minimum-maksimum yang berlaku secara nasional, sehingga capaian Sleman ditempatkan dalam konteks perbandingan yang objektif. Indikator di dalam domain ini yaitu: Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki, tingkat keterlibatan kerja pemuda penyandang disabilitas, serta persentase perkawinan anak yang mencerminkan keseimbangan antara akses, kesempatan kerja, dan perlindungan terhadap kerentanan sosial.

Tabel 4.23 Pengukuran Domain Iklusivitas dan Kesetaraan Gender serta Implikasinya terhadap IPP Kabupaten Sleman

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0.33	0 - 100	Dinormalisasi secara langsung karena semakin tinggi rasio, semakin setara akses kesempatan kerja antar gender. Nilai akhir dikalikan bobot indikator dan bobot domain 0.19	Rasio TPAK yang tinggi menunjukkan kesetaraan kesempatan ekonomi yang baik. Jika Sleman mampu menekan kesenjangan partisipasi kerja, kontribusinya terhadap peningkatan IPP akan cukup signifikan.
Persentase pemuda	0.35	0 - 58	Dinormalisasi terhadap batas	Ini merupakan indikator dengan bobot terbesar di

Indikator Penyusun	Bobot	Batas Min - Maks	Mekanisme Pengukuran dalam IPP	Implikasi terhadap IPP Kabupaten Sleman
penyandang disabilitas yang bekerja			nasional untuk menunjukkan seberapa besar akses kerja bagi pemuda disabilitas	dalam domain. Tingginya angka keterlibatan kerja pemuda disabilitas menunjukkan keberhasilan inklusi sosial dan ekonomi, sehingga berpotensi menjadi pendorong utama nilai IPP Sleman.
Persentase perkawinan anak	0.32	68.99 - 0	Skala dibalik karena semakin rendah angka perkawinan anak semakin baik. Setelah pembalikan, nilai dinormalisasi dan dikalikan bobot indikator serta bobot domain	Perkawinan anak merupakan indikator kerentanan sosial. Jika angka ini rendah, Sleman akan memperoleh peningkatan nilai IPP yang kuat karena mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pemuda, khususnya perempuan, dan kualitas pembangunan sosial yang baik.

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam penjelasan ini, masing-masing indikator penopang pada domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender akan dijelaskan lebih detail, meliputi metode pengukuran, capaian aktual Kabupaten Sleman, serta implikasi kebijakan untuk memperkuat kesetaraan dan inklusi bagi seluruh kelompok pemuda.

4.5.1 Indikator Rasio TPAK Pemuda Perempuan Terhadap Laki-Laki



Indikator ini mengukur proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda perempuan dibandingkan laki-laki. Nilai 92,62 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemuda perempuan telah mencapai sekitar 92,62 persen dari tingkat partisipasi pemuda laki-laki. Artinya, kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja relatif kecil, dan pemuda perempuan hampir memiliki

peluang yang setara dengan pemuda laki-laki untuk masuk ke pasar kerja.

Rasio pemuda perempuan terhadap laki-laki dalam angkatan kerja dapat dihitung dengan nilai indikator = 92,62, artinya:

- TPAK pemuda perempuan = 92,62% dari TPAK pemuda laki-laki.
- Dengan kata lain, setiap 10 pemuda laki-laki yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 9 pemuda perempuan.
- Rasio perbandingan langsung (female-to-male ratio).

Rasio Perempuan : Laki-laki = 92,62:100

atau dinyatakan bahwa rasio terhadap 10 remaja laki-laki:

$$0,93 \times 10 = 9,30$$

Rasio ini menunjukkan bahwa setiap **9 pemuda perempuan yang berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja terdapat sekitar 10 pemuda laki-laki**. Rasio ini memperlihatkan partisipasi pemuda perempuan sudah cukup tinggi, namun masih terdapat celah untuk mencapai kesetaraan penuh.

Tabel 4.24 Capaian dan Transformasi Indikator Rasio TPAK Pemuda Perempuan Terhadap Laki-Laki Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0.33	0	100	92,62	92.62

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman & Identifikasi Tim Penulis

Dengan batas minimum 0 dan maksimum 100, **nilai indikator 92,62** menghasilkan nilai transformasi 92.62. Nilai ini menempatkan Sleman pada **kategori sangat tinggi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam partisipasi angkatan kerja pemuda sangat baik, namun demikian intervensi untuk mendorong inklusivitas penuh, akses peluang kerja yang setara, dan pemberdayaan pemuda perempuan tetap diperlukan.

4.5.2 Indikator Persentase Pemuda Penyandang Disabilitas yang Bekerja



Indikator ini mengukur proporsi pemuda penyandang disabilitas yang terlibat dalam dunia kerja. Dengan nilai 9,84%, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 dari 100 pemuda penyandang disabilitas yang bekerja di Kabupaten Sleman. Capaian ini masih jauh dari batas maksimum indikator, yaitu 58%. Hal tersebut menandakan bahwa

akses dan kesempatan kerja bagi pemuda penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius terkait inklusivitas, akses pelatihan keterampilan, serta dukungan kebijakan bagi penyandang disabilitas di pasar kerja.

Ditinjau dari aspek rasio, data di atas mengindikasikan bahwa rasio pemuda penyandang disabilitas yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja adalah sebagai berikut:

$$100\% - 9.84\% = 90.16\%$$

$$\text{Rasio} = \frac{9.84}{90.1} \approx 1:9$$

Artinya bahwa dari **setiap 9 pemuda penyandang disabilitas hanya terdapat 1 pemuda penyandang disabilitas yang bekerja**. Rasio ini menegaskan bahwa mayoritas pemuda penyandang disabilitas belum terserap ke dunia kerja, sehingga memerlukan intervensi khusus berupa pelatihan keterampilan, akses pekerjaan inklusif, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi kelompok ini.

Tabel 4.25 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Pemuda Penyandang Disabilitas yang Bekerja Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase pemuda penyandang	0.35	0	58	9.84	16.97

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
disabilitas yang bekerja					

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Sleman & Identifikasi Tim Penulis

Ditinjau dari aspek nilai transformasi, batas minimum 0 dan maksimum 58, nilai indikator 9,84 menghasilkan nilai transformasi 16,97, menempatkan Sleman pada kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja bagi pemuda penyandang disabilitas masih sangat terbatas, sehingga hal ini menjadi fokus penting bagi kebijakan pemberdayaan pemuda dan inklusivitas tenaga kerja.

4.5.3 Indikator Persentase Perkawinan Anak



Indikator Persentase Perkawinan Anak termasuk indikator negatif, karena semakin tinggi persentasenya, semakin buruk kondisi sosial dan kesehatan remaja. Dengan nilai 13,38%, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa dari setiap 100 remaja perempuan, sekitar 13 telah menikah sebelum usia 18 tahun.

Angka ini jauh di bawah batas minimum indikator (68,99%) dan jauh dari batas maksimum 0%, sehingga nilai transformasi mencapai 80,61, menandakan capaian relatif baik dalam mencegah perkawinan anak.

Analisis Rasio perkawinan anak terhadap yang tidak menikah dini berdasarkan data persentase di atas adalah :

$$100\% - 13.38\% = 86.62\%$$

$$Rasio = \frac{13.38}{86.62} \approx 1:6.5$$

Rasio tersebut menjelaskan bahwa setiap 1 remaja yang menikah sebelum usia 18 terdapat sekitar 6-7 remaja lain yang belum menikah. Rasio ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja Sleman masih aman dari risiko perkawinan anak. Namun, ada kelompok kecil yang perlu menjadi fokus intervensi pencegahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, kebijakan perlindungan anak, dan program pendampingan keluarga.

Tabel 4.26 Capaian dan Transformasi Indikator Persentase Perkawinan Anak Sleman

Indikator	Bobot	Batas Minimum	Batas Maksimum	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
Persentase perkawinan anak	0.32	68.99	0	13.38	80.61

Sumber: Data pada Website SIGA

Karena indikator ini bersifat *bad indicator*, transformasi nilai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Transformasi} = \frac{\text{Maksimum} - \text{Nilai Aktual}}{\text{Maksimum} - \text{Minimum}} \times 100$$

Substitusi menghasilkan nilai transformasi 80,61, yang menempatkan Sleman dalam **kategori tinggi** dari sisi keberhasilan menekan perkawinan anak. Hal ini menandakan keberhasilan relatif baik Kabupaten Sleman dalam melindungi remaja perempuan dari perkawinan dini, meskipun tetap diperlukan pemantauan dan intervensi berkelanjutan.

4.5.4 Capaian Nilai Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender

Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender mencakup tiga indikator utama yang masing-masing memiliki bobot serta nilai transformasi tertentu. Ketiga indikator ini berfungsi sebagai komponen penilaian untuk melihat sejauh mana prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas telah diinternalisasikan dalam kehidupan pemuda. Bobot dan nilai transformasi yang diberikan menunjukkan kontribusi relatif tiap indikator dalam membentuk nilai akhir domain, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kondisi inklusivitas dan kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Sleman.

Berikut merupakan hasil bobot dan transformasi nilai pada indikator domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender Kabupaten Sleman 2025.

Tabel 4.27 Bobot dan Nilai Transformasi Indikator Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender

Indikator	Bobot	Nilai Transformasi
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0.33	92.62
Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	0.35	16.97
Persentase perkawinan anak	0.32	80.61

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Nilai domain dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai domain} = \sum(\text{Bobot})_i \times (\text{Nilai Transformasi})_i$$

Dengan mensubstitusikan nilai dari masing-masing indikator, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender} \\ &= (0,33 \times 92,62) + (0,35 \times 16,97) + (0,32 \times 80,61) \\ &= 30,56 + 5,94 + 25,79 \\ &= \mathbf{62,30} \end{aligned}$$

Kategorisasi nilai domain (rentang 0-100) adalah sebagai berikut:

- 0 - 60 → **Rendah**
- 60 - 80 → **Sedang**
- 80 - 100 → **Tinggi**

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai **62,30** menempatkan **domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender** pada kategori **rendah** dalam pengukuran IPP Kabupaten Sleman.

Nilai domain yang berada pada kategori rendah mencerminkan bahwa Kabupaten Sleman masih menghadapi tantangan signifikan terkait inklusivitas dan kesetaraan gender di kalangan pemuda. Meskipun indikator rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki serta angka perkawinan anak menunjukkan capaian yang relatif positif, skor yang sangat rendah pada indikator persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja secara nyata menurunkan kinerja domain secara keseluruhan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses pemuda penyandang disabilitas terhadap kesempatan kerja masih sangat terbatas sehingga menghambat terwujudnya kesetaraan gender dan inklusivitas di ranah sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, domain ini menjadi area strategis yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan kepemudaan, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh kelompok pemuda, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memperoleh peluang yang setara untuk berpartisipasi dan berkembang secara produktif dalam kehidupan masyarakat.



5- ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMUDA BERDASARKAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN SLEMAN 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran yang dihimpun dari kinerja berbagai indikator dalam lima domain utama yang menjadi struktur dasar IPP. Dalam penyusunannya, pendekatan *evidence-based policy* menempatkan data kuantitatif pada domain-domain seperti Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta

Inklusivitas dan Kesenjaraan Gender, sebagai pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan kepemudaan yang presisi, dapat diukur, dan akuntabel.

Setiap nilai indikator dalam IPP Sleman bukan sekadar angka statistik melainkan representasi kondisi faktual yang memperlihatkan dinamika, kesenjangan, maupun potensi tantangan struktural yang dihadapi pemuda. Sebagai contoh, tingginya capaian pada indikator keterampilan TIK menunjukkan adanya peluang pengembangan ekonomi digital di kalangan pemuda, sementara rendahnya persentase pemuda yang memperoleh pelatihan bersertifikat mengindikasikan bahwa proses *upskilling* belum merata. Deviasi antara nilai aktual indikator dengan nilai ideal atau maksimum menjadi sinyal penting mengenai area yang membutuhkan intervensi segera sekaligus membuka ruang bagi inovasi, baik dalam program pengembangan kapasitas, penyediaan layanan, maupun perumusan kebijakan lintas sektor.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, data kuantitatif IPP Sleman 2025 memungkinkan pemerintah menyusun prioritas kebijakan berbasis urgensi dan besaran dampak. Hal ini membantu merancang strategi yang lebih tajam, realistis, dan berorientasi hasil, sekaligus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara efektif. Lebih jauh, penggunaan data yang konsisten dari tahun ke tahun menciptakan mekanisme evaluasi yang objektif sehingga proses kebijakan menjadi adaptif: dirumuskan berdasarkan bukti, diimplementasikan, kemudian dinilai kembali untuk penyempurnaan berkelanjutan. Dengan demikian, angka capaian IPP berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjamin bahwa kebijakan kepemudaan benar-benar responsif terhadap kebutuhan pemuda Sleman, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat peningkatan kualitas hidup mereka.

Selain itu, pemanfaatan data indikator dalam IPP Sleman 2025 menggeser proses perumusan kebijakan dari pendekatan berbasis asumsi menuju pendekatan yang lebih ilmiah. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam menggambarkan kondisi pemuda, sehingga nilai domain yang dihasilkan merupakan gambaran komprehensif tentang situasi kepemudaan pada aspek tertentu. Ketika suatu domain menunjukkan capaian yang belum optimal – misalnya pada domain Inklusivitas dan Kesenjaraan Gender atau Kesempatan Kerja

– hal tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan intervensi secara lebih spesifik dan tepat sasaran. Data juga membantu mengidentifikasi kelompok pemuda yang paling rentan, seperti mereka yang tidak mengikuti pelatihan, belum menyelesaikan pendidikan menengah, atau memiliki hambatan dalam memasuki dunia kerja modern. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi dapat difokuskan pada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Di sisi lain, keberadaan data kuantitatif dalam IPP Sleman memperkuat akuntabilitas publik dalam proses pembangunan kepemudaan. Ketika arah kebijakan dirumuskan berdasarkan angka yang terukur, maka setiap keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Konsistensi penggunaan data juga memungkinkan publik memantau apakah program yang dijalankan memberikan perubahan nyata. Artinya, angka capaian IPP bukan hanya merekam kondisi saat ini, tetapi juga berperan sebagai kompas strategis yang mengarahkan pembangunan pemuda Sleman menuju arah yang lebih terukur, adil, dan berkelanjutan.

5.1 CAPAIAN NILAI INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) KABUPATEN SLEMAN 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sleman Tahun 2025 mencapai angka 78,40. Nilai ini menempatkan Sleman pada kategori “tinggi” dalam skala penilaian 0-100. Nilai ini juga menunjukkan bahwa secara umum kondisi pembangunan kepemudaan di kabupaten Sleman berada pada arah yang sangat positif. Capaian tersebut merupakan hasil komposit dari lima domain utama – pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender – yang bersama-sama memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup pemuda di daerah ini. Meskipun demikian, nilai yang tinggi pada tingkat agregat tidak menutup kemungkinan adanya ketimpangan antardomain, sehingga beberapa aspek masih membutuhkan perhatian dan penguatan kebijakan lebih lanjut.

Tabel 5.1 Nilai IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025

Domain	Indikator	Nilai Indikator	Nilai Domain
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	40,89	98,46
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	88,73	
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	100	
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	6,42	67,80
	Persentase pemuda yang merokok	25,8	
	Persentase pemuda yang berolahraga	65,8	
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	34,47	
Ketenagakerjaan Layak	Persentase pemuda NEET	10	87,82
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	23,99	
	Rasio kewirausahaan pemuda	1,75	
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	81,4	73,79
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	18,5	
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	1,59	
Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	92,62	62,30
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	9,84	
	Persentase perkawinan anak	13,38	
NILAI IPP KAB SLEMAN 2025			78,40

Sumber: Data Diolah, 2025

Capaian IPP Kabupaten Sleman tahun 2025 merupakan representasi dari kinerja berbagai indikator kuantitatif dalam lima domain utama yang membentuk struktur indeks. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan *evidence-based policy* menjadi sangat penting karena setiap nilai indikator memberikan gambaran objektif mengenai situasi aktual pemuda. Data kuantitatif tersebut menjadi landasan strategis untuk menyusun arah kebijakan yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Domain **Pendidikan dan Pelatihan** mencapai nilai **98,46**, yang menempatkannya pada kategori **sangat tinggi** serta menjadi pilar terkuat dalam kontribusinya terhadap nilai keseluruhan IPP Kabupaten Sleman. Capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, kualitas layanan, serta tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan dan pelatihan sudah berlangsung secara optimal.

Ketersediaan fasilitas pendidikan, tingginya tingkat kelulusan, serta meningkatnya partisipasi dalam pendidikan menengah dan pelatihan vokasional mencerminkan efektivitas berbagai program peningkatan kualitas SDM pemuda.

Sebaliknya, domain **Kesehatan** mencatat nilai **67,80**, yang berada pada kategori **sedang**. Capaian ini mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan pemuda Sleman masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa isu yang menonjol antara lain rendahnya cakupan layanan kesehatan ramah pemuda, perilaku hidup sehat yang belum merata, serta aspek kesehatan reproduksi yang membutuhkan perhatian lebih intensif. Nilai ini menjadi sinyal bahwa peningkatan akses, literasi kesehatan, dan kualitas intervensi kesehatan pemuda perlu terus diperkuat.

Pada domain **Ketenagakerjaan Layak**, Kabupaten Sleman memperoleh nilai **87,82** (kategori **tinggi**). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki peluang yang cukup baik untuk mengakses pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, isu ketidakstabilan pekerjaan, kesenjangan keterampilan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi kerja masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini menuntut optimalisasi program peningkatan keterampilan, pemagangan, serta perluasan kesempatan kerja yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

Domain **Partisipasi dan Kepemimpinan** memperoleh nilai **73,79** (kategori **tinggi**), yang mencerminkan meningkatnya peran pemuda dalam ruang-ruang partisipasi publik, organisasi kemasyarakatan, dan proses pengambilan keputusan. Tingginya minat pemuda untuk terlibat dalam aktivitas sosial menunjukkan adanya modal sosial yang kuat. Namun, perluasan jangkauan partisipasi, peningkatan akses bagi kelompok pemuda marjinal, serta penguatan kapasitas kepemimpinan tetap menjadi agenda strategis yang perlu ditingkatkan.

Sementara itu, domain **Inklusivitas dan Kesenjangan Gender** mendapatkan nilai **62,30**, termasuk kategori **sedang**. Capaian ini mengisyaratkan bahwa kesetaraan akses antara pemuda laki-laki dan perempuan masih belum sepenuhnya optimal. Tantangan yang menonjol meliputi keterbatasan representasi perempuan muda dalam ruang publik, disparitas kesempatan dalam dunia kerja, serta akses pemuda penyandang disabilitas yang belum merata. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih

spesifik untuk memperkuat aspek inklusivitas dan memperkecil kesenjangan gender.

Secara keseluruhan, capaian IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025 menggambarkan tren pembangunan kepemudaan yang berada pada arah positif, dengan nilai tinggi pada beberapa domain strategis. Namun demikian, penguatan kebijakan secara berkelanjutan tetap diperlukan, terutama pada domain kesehatan serta inklusivitas dan kesetaraan gender, agar pembangunan kepemudaan dapat berlangsung lebih merata, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh kelompok pemuda.

5.2 KUADRAN PRIORITAS CAPAIAN INDIKATOR IPP 2025

Apabila dilakukan peninjauan lebih lanjut berdasarkan keseluruhan 16 indikator penyusun IPP Kabupaten Sleman tahun 2025, pemetaan dapat dilakukan melalui pendekatan *Kelompok Kuadran*. Metode ini mengelompokkan setiap indikator ke dalam kategori tertentu berdasarkan dua pertimbangan utama, yakni: (1) capaian kinerja indikator saat ini, dan (2) tingkat kesesuaiannya terhadap standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pendekatan pemetaan kuadran ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi masing-masing indikator, sehingga pemerintah daerah dapat melihat dengan jelas indikator mana yang telah mencapai performa optimal dan layak dipertahankan, serta indikator mana yang justru menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan standar nasional. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan situasi kinerja pemuda secara umum, tetapi juga mengarahkan pemerintah untuk menetapkan prioritas intervensi pembangunan kepemudaan secara lebih terarah dan strategis.

Melalui pemetaan ini, pemerintah Kabupaten Sleman dapat:

1. **Mengidentifikasi indikator unggulan** yang menunjukkan capaian sangat baik dan perlu dipertahankan serta diperkuat melalui kesinambungan program.
2. **Menentukan indikator dengan kinerja moderat**, yang membutuhkan peningkatan bertahap agar sejajar dengan standar nasional.

3. **Menyoroti indikator yang berada pada kategori rendah atau belum memenuhi standar**, sehingga menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan dan alokasi sumber daya.



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar 5.1 Kuadran Capaian Indikator IPP Kabupaten Sleman 2025

1. KUADRAN I - PRIORITAS UTAMA

(Indikator dengan capaian rendah namun berdampak strategis; membutuhkan intervensi segera dan komprehensif)

Kuadran I memuat indikator-indikator yang memiliki tingkat capaian relatif rendah tetapi memberikan dampak strategis yang signifikan terhadap pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman. Indikator pada kelompok ini merupakan titik kritis yang apabila tidak segera ditangani, dapat menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan jangka panjang bagi pemuda. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat intensif, lintas sektor, dan berkelanjutan menjadi keharusan.

Tabel 5.2 Analisis Indikator Kuadran I

Indikator	Ketercapaian	Alasan Masuk Prioritas
Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	16,97	Akses kerja disabilitas sangat rendah, berdampak besar pada domain inklusivitas & ketenagakerjaan.
Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	39,75	Rendahnya representasi kepemimpinan strategis; berdampak langsung pada kualitas

Indikator	Ketercapaian	Alasan Masuk Prioritas
		partisipasi dan pembangunan sosial.
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	29,67	Indikator sensitif kesehatan reproduksi; risiko sosial dan kesehatan tinggi.
Persentase pemuda yang merokok	55,26	Capaian moderat tetapi berdampak negatif tinggi terhadap kesehatan jangka panjang.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2. KUADRAN II - DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN

(Capaian sedang; indikator memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap pembangunan pemuda)

Indikator-indikator yang masuk dalam Kuadran II menunjukkan capaian yang relatif baik namun belum optimal, sehingga diperlukan strategi peningkatan secara berkelanjutan. Indikator dalam kelompok ini memiliki relevansi strategis terhadap kualitas pembangunan pemuda, sehingga perbaikannya akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan IPP Kabupaten Sleman secara keseluruhan.

Tabel 5.3 Analisis Indikator Kuadran II

Indikator	Ketercapaian	Catatan
Rasio kewirausahaan pemuda	70%	Masih perlu perluasan ekosistem kewirausahaan, inkubasi, dan akses permodalan.
Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81,40%	Baik, namun masih dapat ditingkatkan terutama pada partisipasi kelompok rentan.
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	92,62%	Hampir setara, tetapi ruang peningkatan tetap terbuka terutama pada kesempatan kerja formal.
Persentase perkawinan anak	80,61%	Sudah tinggi, namun isu sensitif sehingga tetap perlu menjaga dan menekan kasus residual.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3. KUADRAN III - CAKUPAN TINGGI, DIPERTAHANKAN

(Indikator dengan capaian tinggi, tetap perlu stabilisasi)

Indikator-indikator dalam kuadran ini menunjukkan capaian yang sudah berada pada level tinggi, sehingga tidak memerlukan intervensi prioritas. Namun demikian, keberhasilan ini tetap membutuhkan upaya stabilisasi agar

capaian yang sudah baik tidak mengalami penurunan. Fokus kebijakan diarahkan pada pemeliharaan kualitas, penguatan keberlanjutan program, serta perlindungan agar tidak terjadi regresi akibat dinamika sosial maupun perubahan situasi ekonomi.

Tabel 5.4 Analisis Indikator Kuadran III

Indikator	Ketercapaian	Catatan
Angka kesakitan pemuda (Semakin kecil semakin baik)	89,37%	Tetap dipertahankan dengan memperkuat layanan kesehatan ramah pemuda.
Persentase pemuda yang berolahraga	94%	Perlu menjaga keberlanjutan fasilitas dan kebiasaan hidup sehat.
Persentase pemuda pekerja tidak penuh (semakin kecil semakin baik)	92,88%	Relatif baik, namun perlu guard agar tidak terjadi kenaikan angka pekerjaan tidak stabil.
Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	95,46%	Hampir mencapai batas maksimal, tetap perlu menjaga akses pendidikan lanjutan.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

4. KUADRAN IV - SANGAT BAIK, PERTAHANKAN & OPTIMALKAN

(Capaian sangat tinggi, menjadi kekuatan IPP Sleman)

Kuadran IV memuat indikator-indikator dengan capaian sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah memiliki fondasi pembangunan pemuda yang kuat dan kompetitif. Indikator-indikator dalam kuadran ini perlu dipertahankan kualitasnya, sekaligus dioptimalkan untuk mendorong keunggulan daerah secara berkelanjutan. Kinerja prima ini menjadi modal strategis yang dapat ditransformasikan ke dalam program-program pengembangan pemuda yang lebih inovatif dan berdampak jangka panjang.

Tabel 5.5 Analisis Indikator Kuadran IV

Indikator	Ketercapaian	Catatan
Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	100%	Kategori sempurna; dorong sertifikasi lanjutan & kualitas pelatihan.
Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	100%	Menjadi modal besar transformasi digital; perlu penguatan kompetensi lanjutan.
Persentase pemuda NEET (Semakin kecil semakin baik)	100%	Capaian sangat baik; penting menjaga monitoring rutin dan pencegahan NEET baru.
Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	100%	Kapasitas organisasi pemuda perlu difasilitasi untuk memperkuat kepemimpinan.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Dengan demikian, pemetaan berdasarkan analisis kuadran menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki sejumlah indikator unggul terutama dalam literasi digital, pelatihan, partisipasi organisasi, dan tingkat pendidikan. Namun demikian, beberapa indikator kesehatan, ketenagakerjaan, dan inklusivitas seperti angka merokok, remaja hamil, pekerja tidak penuh, dan representasi manajerial pemuda menjadi area yang membutuhkan **intervensi prioritas** dalam kebijakan kepemudaan tahun-tahun mendatang.

5.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN HASIL IPP 2025

Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memiliki arti penting sebagai instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam

memahami dinamika perkembangan pemuda usia 16-30 tahun secara objektif dan terukur. Dengan berbasis pada bukti kuantitatif (*evidence-based*), IPP mampu memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di bidang kepemudaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil pemuda dan dilaksanakan secara terarah, terukur, serta berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, ditegaskan bahwa Nilai IPP merupakan dasar operasionalisasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan. Dokumen RAD harus disusun berdasarkan lima domain utama IPP, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan,
2. Kesehatan,
3. Ketenagakerjaan Layak,
4. Partisipasi dan Kepemimpinan, dan
5. Inklusivitas dan Kesetaraan Gender.

Dengan demikian, hasil perhitungan nilai indikator dan capaian domain IPP Kabupaten Sleman tahun 2025 menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan intervensi prioritas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan.

Arah Rekomendasi Pengembangan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sleman berdasarkan capaian nilai indikator dan nilai domain IPP Tahun 2025 sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, maka penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sleman perlu diarahkan pada langkah-langkah strategis berikut:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor berbasis domain IPP
Penyelenggaraan RAD harus melibatkan perangkat daerah lintas sektor yang relevan sesuai struktur domain IPP, seperti dinas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, sosial, hingga Bappeda. Koordinasi ini diperlukan untuk:
 - a. Menyusun kompilasi isu-isu strategis per domain,
 - b. Mengidentifikasi permasalahan yang masih menjadi kendala,
 - c. Merumuskan perbaikan data dan tata kelola *monitoring* capaian pemuda.

2. Koordinasi yang kuat akan memastikan bahwa program kepemudaan tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah

3. Penyusunan isu strategis dan arah kebijakan berbasis kinerja indikator

Setiap domain IPP memiliki indikator yang menunjukkan kekuatan maupun kelemahan. Oleh karena itu:

a. Indikator dengan capaian rendah dan pemenuhan standar rendah (Kuadran 1), seperti remaja hamil, pemuda merokok, disabilitas bekerja, dan posisi manajerial, harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kebijakan.

b. Indikator dengan capaian baik namun belum memenuhi standar (Kuadran 2 dan 3) perlu dirumuskan dalam bentuk program perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

c. Indikator dengan capaian tinggi dan pemenuhan optimal (Kuadran 4) harus dijaga melalui keberlanjutan program.

Isu strategis ini kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih operasional dalam RAD.

4. Merumuskan program, kegiatan, dan aktivitas berdasarkan kesenjangan data.

RAD perlu berorientasi pada program yang secara langsung mampu meningkatkan nilai indikator dan domain IPP. Contohnya:

a. Domain Kesehatan, Program penurunan perilaku merokok pemuda, layanan kesehatan reproduksi ramah pemuda, dan intervensi pencegahan kehamilan remaja.

b. Domain Ketenagakerjaan Layak, Perluasan akses pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi TIK, serta dukungan kewirausahaan pemuda.

c. Domain Partisipasi, Memperluas ruang partisipasi organisasi dan penguatan kapasitas kepemimpinan generasi muda.

d. Domain Inklusivitas, Pengembangan ekosistem kerja inklusif bagi pemuda penyandang disabilitas serta pencegahan perkawinan anak.

Hal ini memastikan bahwa kegiatan yang dirancang benar-benar berkontribusi langsung pada peningkatan nilai domain IPP.

5. Menyusun target dan sasaran terukur untuk mengungkit perbaikan indikator.
6. RAD harus menetapkan target indikator yang realistis namun ambisius untuk periode 2025-2029, yang mengacu pada:
 - a. Tren capaian IPP Kabupaten Sleman,
 - b. Standar Kemenpora,
 - c. Kemampuan fiskal dan kapasitas kelembagaan,
 - d. Tantangan dan peluang program lintas sektor.
 - e. Sasaran kinerja harus disusun secara kuantitatif untuk memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas dalam mengukur peningkatan nilai domain IPP dari tahun ke tahun.

Dengan menjadikan IPP sebagai dasar penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten Sleman akan mampu melaksanakan kebijakan kepemudaan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Pendekatan *Evidence-based policy* yang dikombinasikan dengan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pembangunan kepemudaan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup pemuda Kabupaten Sleman secara berkelanjutan.



6- PENUTUP

Berdasarkan capaian IPP Kabupaten Sleman Tahun 2025, terlihat bahwa terdapat kekuatan signifikan pada domain Pendidikan dan Pelatihan, serta kinerja yang relatif tinggi pada domain Ketenagakerjaan Layak dan Partisipasi dan Kepemimpinan. Untuk mempertahankan capaian tersebut, diperlukan kesinambungan program yang telah berjalan, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan akses dan partisipasi pemuda secara optimal. Sementara itu, domain Kesehatan serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender menunjukkan kebutuhan perbaikan yang lebih terfokus. Strategi yang direkomendasikan antara lain penguatan literasi dan akses layanan kesehatan pemuda, pengembangan intervensi kesehatan reproduksi, serta implementasi kebijakan inklusif yang mendorong kesetaraan gender, peningkatan representasi perempuan muda, dan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, pencapaian IPP ini harus dijadikan dasar perumusan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, dengan koordinasi aktif antara dinas, institusi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait. Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) perlu terus dikedepankan agar setiap intervensi dapat tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sleman dapat berlangsung secara berkelanjutan, inklusif, dan adil, mencerminkan kondisi aktual pemuda serta mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan budaya di masa mendatang.

DISPORA SLEMAN



DAFTAR PUSTAKA

- Al Izzati, R., Murniati, S., & Kumala Dewi, R. (2022). *Indeks Pembangunan Pemuda 2022*. 1-93. www.smeru.or.id.
- Bappenas. (2021). *INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2021*.
- Bulmer, M. (1984). *Sociological Research Methods. An Introduction*. Macmillan Education.
- Clapp, J., & Sen, A. (1999). Development as Freedom. In *International Journal* (Vol. 55, Issue 1, p. 160). <https://doi.org/10.2307/40203469>
- Corbin, J., & Morse, J. M. (2003). Qualitative Inquiry The Unstructured Interactive Interview: *Qualitative Inquiry*, 9(3), 335-354. <https://doi.org/10.1177/1077800403251757>
- Desrosières, A. (2009). How to be real and conventional: A discussion of the quality criteria of official statistics. *Minerva*. <https://doi.org/10.1007/s11024-009-9125-3>
- Efendi, A. (2020). Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (Ipp) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 9(1), 39-48. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/4381>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity Youth and Crisis*. W. W. Norton.

- Ghasarian, C., Bourdieu, P., & Nice, R. (1995). Sociology in Question. In *Anthropological Quarterly* (Vol. 68, Issue 1, p. 67). <https://doi.org/10.2307/3317467>
- Hazra, A. (2017). Using the confidence interval confidently. *Journal of Thoracic Disease*, 9(10), 4125-4130. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.09.14>
- Muryadi, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pemuda Dan Olahraga Di Indonesia. *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in Sports towards a Healthy Lifestyle, April*, 1-6.
- Naviah, N. I. (2020). *Sejarah Peran Pemuda dalam Pergerakan Indonesia*.
- Neuman, W. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- PUPR, B. (2017). *Modul 1 Pemahaman Umum Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur*. 53.
- Rifano, A. T. S. (2017). Membangun Kebijakan Pro-Pemuda. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 73-75. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.01.6>
- TOURAINE, A. (1985). An Introduction to the Study of Social Movements. *Social Research*, 52(4), 749-787.
- UNESCO. (2021). *Education Infrastructure and Learning Outcomes*. <https://www.unesco.org>
- Usnan. (2021). Meningkatkan Peran Pemuda. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 87-100.